



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2020 yang merupakan dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 memuat isu-isu strategis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota selama Tahun 2020.

Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 ini merupakan penjabaran kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 menyajikan Tugas Pokok dan Fungsi, Perencanaan Strategik Instansi, Kerangka Regulasi pada masing-masing Program berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai Landasan Yuridis dan Dasar Kebijakan dalam pelaksanaan program kesekretariatan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 ini disusun berdasarkan pemikiran yang komprehensif dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah, sedang dan akan dijalankan, sehingga



Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekretariatan melalui pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020.

Banjarbaru, 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si

NIP. 19650928 199203 1 008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	6
B. Identifikasi Masalah	11
C. Hubungan Rencana Kerja Dengan Dokumen Lainnya	12
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	17
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Tujuan dan Sasaran	41
B. Program dan Kegiatan	42
BAB IV. Kebijakan Prioritas Tahun 2020	
A. Kerangka Regulasi	49
B. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah	50
BAB V. PENUTUP	53
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang terhadap pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 Pasal 14 ayat (1) tersebut, menyebutkan "*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi antara lain pelayanan administrasi umum pemerintahan*".

Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat wajib tersebut telah menetapkan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat daerah lainnya. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka semakin memperkuat kedudukan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai pelaksana penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai salah satu instansi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang struktur dan tata kerjanya disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru kemudian Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah didasarkan kepada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagai salah satu instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 yang sumber pendanaannya baik yang dibiayai oleh APBD Kota Banjarbaru.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maka disusunlah suatu rencana kerja berupa Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2020 yang menjadi acuan dan arahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan. Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru, yang akan digunakan sebagai dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun 2020.

Dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2019;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 , Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-to 2019;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 536);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-to 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
 23. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
-



24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/346/KUM/2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Konsistensi landasan hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan gerak langkah operasional dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas dan mampu menjawab tuntutan kebutuhan sinergis vertikal dan koordinasi lintas wilayah. Dalam penyusunan Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 sangat erat kaitannya dan tidak akan terlepas dari dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; yang memasukan Kota Banjarbaru dalam Orde kedua. Penetapan RTRW Provinsi tersebut memberikan dukungan dan merupakan peluang bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan;
2. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2011-2020; dimana Renja-SKPD harus mengacu dan mempedomani RUTRK tersebut sehingga pada pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari RUTRK Banjarbaru Tahun 2011-2020;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banjarbaru; dimana Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan penjabaran terhadap dokumen perencanaan RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dimana Renja SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 harus saling mendukung antara satu dengan lainnya dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;
5. Rencana Kerja SKPD Provinsi yang terkait; dimana Renja SKPD pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus tetap mengacu dan mendukung Rencana Kerja SKPD Provinsi yang terkait lainnya (seperti : Sekretariat Propinsi) di Provinsi Kalimantan Selatan;



6. Rencana Kerja Kementerian terkait; dimana Renja SKPD pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus mendukung dan menjabarkan Renja Kementerian terkait sesuai dengan bidang tugas yang terdapat pada SKPD.

A. Kondisi Umum

Kedudukan Sekretariat Daerah didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang menyatakan bahwa “Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota” dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan :

- a. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian pemerintahan Umum;
 - 2). Sub Bagian Bina Perangkat Daerah;
 - 3). Sub Bagian Otonomi Daerah.
- b. Bagian Hukum:
 - 1). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- c. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 - 2). Sub Bagian Sosial Kesejahteraan Rakyat;
 - 3). Sub Bagian Sosial Budaya.

2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :

- a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan :
 - 1). Sub Bagian Kajian Investasi;
 - 2). Sub Bagian Perekonomian;
 - 3). Sub Bagian Pembangunan.
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :
 - 1). Sub Bagian Fasilitas Kelompok Kerja;



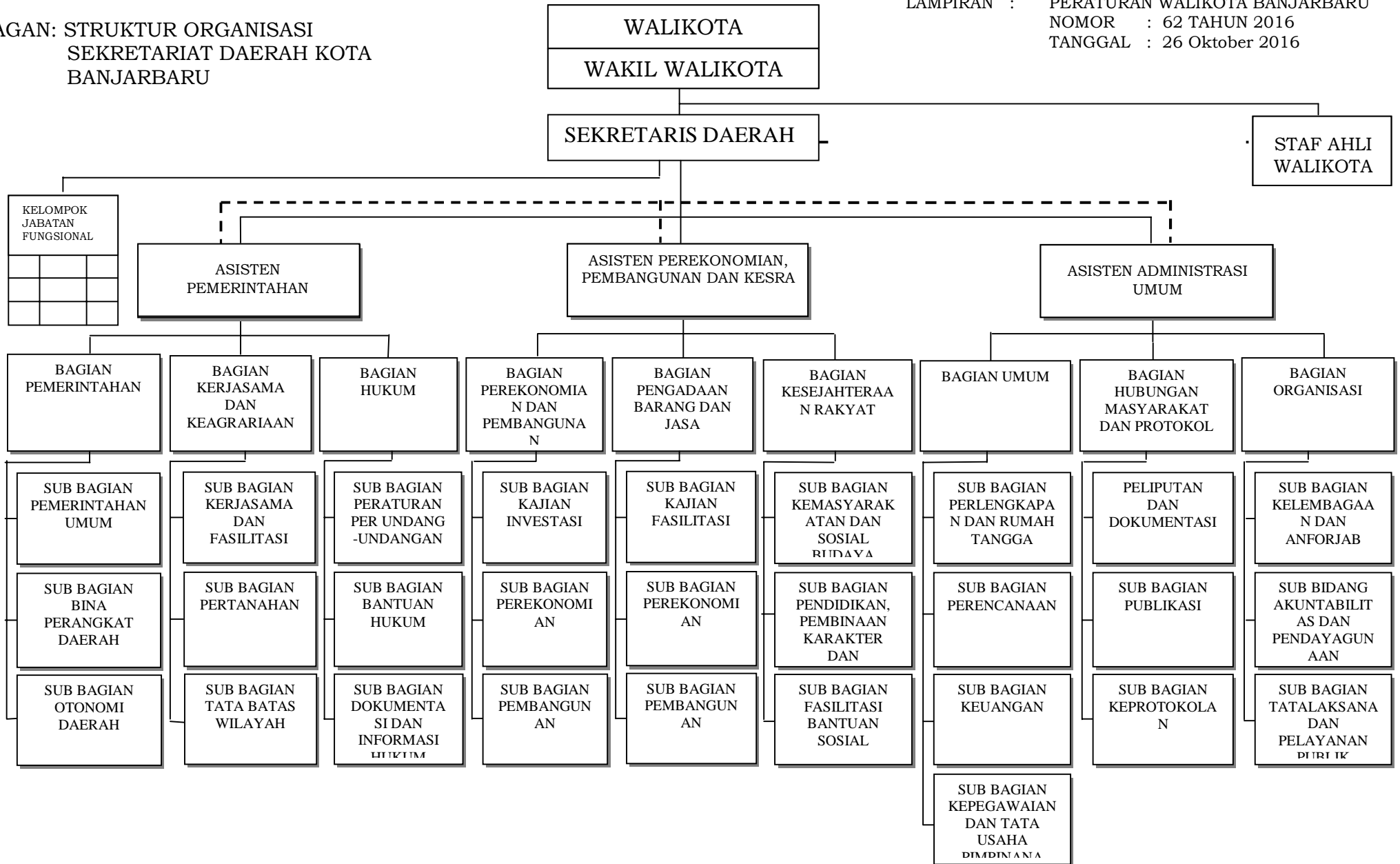
- 2). Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen;
 - 3). Sub Bagian Informasi dan Konsultasi.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - 1). Sub Bagian Kemasyarakatan dan Sosial Budaya;
 - 2). Sub Bagian Pendidikan, Pembinaan Karakter dan Keagamaan;
 - 3). Sub Bagian Fasilitas Bantuan Sosial .
- 3. Asisten Administrasi Umum :**
- a. Bagian Umum :
 - 1). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - 2). Sub Bagian Perencanaan;
 - 3). Sub Bagian Keuangan;
 - 4). Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Pimpinan.
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol :
 - 1). Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2). Sub Bagian Publikasi;
 - 3). Sub Bagian Keprotokolan.
 - c. Bagian Organisasi :
 - 1). Sub Bagian Kelembagaan dan Anforjab;
 - 1). Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur ;
 - 2). Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah, dapat terlihat dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2020 didukung oleh 286 orang personil, yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural sebanyak = 215 orang.
- b. Pegawai Non PNS sebanyak 71 orang terdiri dari :
 1. Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak = 6 orang
 2. Tenaga Kontrak sebanyak = 65 orang

Tabel 1.1
Keadaan PNS Berdasarkan Golongan

Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																				
URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV				
	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh
Pejabat (Sekda, Staf Ahli, Asisten,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
Bagian Umum	-	-	-	-	-	1	2	3	2	8	4	4	3	2	13	-	1	-	-	1
Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	1	-	-	-	1
Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	9	1	-	-	-	1
Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	6	2	-	-	-	2
Bagian Humas dan Protokol	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	2	2	-	11	-	1	-	-	1
Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	7	1	-	-	-	1
Bagian Perekonomian & Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	8	-	1	-	-	1
Bagian Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	-	8	1	-	-	-	1
Bagian Kerjasama & Keagrariaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	7	-	1	-	-	1
Jumlah	-	-	-	-	-	1	2	6	5	14	26	22	23	8	75	6	4	6	1	16

Sumber : Bagian Umum Sub Bagian Kepegawaian & TU pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2020

Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" LS dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" BT. Wilayah ini dibagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan dengan perbatasan yaitu sebelah Utara dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sebelah Selatan dengan Tanah Laut, sebelah Timur dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, sebelah Barat dengan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0 – 500 m dari permukaan laut dengan ketinggian 0 –7 m (33,49 %), 7 – 25 m (48,46%), 25-100 m (15,15 %), 100-250 m (2,55 %) dan 250-500 m (0,35m). Adapun kondisi fisik tanah yang dapat dipergunakan untuk

menggambarkan kondisi efektif pertumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase, keadaan erosi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Klasifikasi Kelerengan Kota Banjarbaru adalah Kelerengan 0-2 % mencakup 59,35 % luas wilayah kelerengan 2-8 % mencakup 25,78 % wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 % wilayah.
- Klasifikasi Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan > 90 cm. Kota Banjarbaru secara umum mencapai kedalaman efektif lebih 90 cm dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodic yaitu tergenang kurang dari 6 bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh.

Berdasarkan Peta Kemampuan Tanah Skala 1 : 25.000, erosi tidak terjadi di Kota Banjarbaru. Berdasarkan Peta Geologi Tahun 1970 batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 %, Martapura (Qpm) 37,71 % Benuang (Tob) 3,64 %, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 %, Formasi Pitat 3,47%.

Jenis tanah terbentuk dari faktor-faktor pembentuk tanah antara lain : batuan Induk, Iklim, Topografi, vegetasi dan waktu. Tiap jenis tanah mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik tanah tersebut misalnya berkaitan tingkat kepekaannya terhadap erosi, kesuburan tanah, tekstur tanah dan konsistensi tanah. Berdasarkan peta skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di Wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 jenis kelompok tanah yaitu Podsolik (63,83 %), Lathosol (6,36 % dan Organosol (29,82 %)).

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka Kota Banjarbaru juga hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari

Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada Bulan Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini biasanya berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober-November.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Syamsuddin Noor pada tahun 2002 suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisar antara $21,1^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $34,6^{\circ}\text{C}$ suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan oktober ($37,2^{\circ}\text{C}$) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan agustus ($18,8^{\circ}\text{C}$). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 69,3 % sampai 86 % dengan kelembaban maksimum tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Juni serta kelembaban minimum terendah terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2002 tercatat 151,2 mm dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan September ($5,0\text{ mm}$) dan tertinggi terjadi pada bulan maret ($304,9\text{ mm}$). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 14 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember (25 hari) sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan September (1 Hari). Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru tahun 2002 berkisar antara 1012,8 mb sampai dengan 1008,3 mb sedangkan rata-rata kecepatan angin sekitar 13,9 knots.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melakukan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat daerah lainnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Permasalahan secara umum yang dihadapi pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien;
4. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional ;
5. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
6. Dinamika perubahan dan perkembangan global yang semakin cepat;
7. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Kemampuan anggaran pembangunan yang masih tergantung ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang anggarannya masih terbatas sehingga pembangunan lebih diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya proyeritas;
9. Kebijakan Pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

C. Hubungan Rencana Kerja (Renja) Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

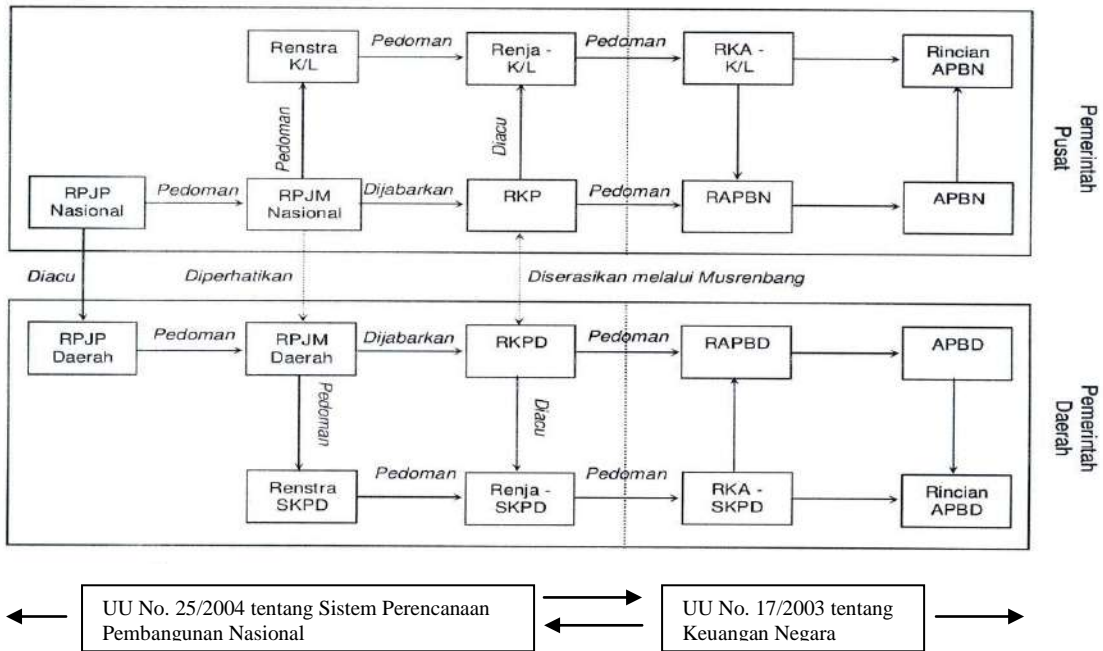
Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan satu bagian manajemen Pemerintah Kota Banjarbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus sinergis dengan rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :



- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang Diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kota Banjarbaru;
- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Gambaran Pelayanan Masa Kini, Gambaran Pelayanan yang Diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru;
- d. Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD), disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;
- e. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun sebagai tindak lanjut Renstra SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Adapun gambaran hubungan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dengan dokumen perencanaan lainnya tercermin pada bagan berikut :



D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen Perencanaan lainnya, Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun yang lalu dilihat dari capaian masing-masing Misi Sekretariat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Memaparkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sesuai RPJMD yang dijabarkan tahunan dalam Rencana Kerja, beserta program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2020.

BAB IV KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2020



Memaparkan tentang kerangka regulasi, Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah serta alokasi anggaran dari APBD Kota Banjarbaru Tahun 2020

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil pencapaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2019 pada 20 program wajib adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 97,29%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 91,91%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 99,33%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 98,33 %
5. Program Penataan Peraturan Perundang –undangan : 87,43%
6. Program Peningkatan Administratif Pembangunan Daerah :98,87%
7. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah :98,02%



8. Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan :95,50%
9. Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah : 94,68 %
10. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan : 94,04 %
11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah : 97,36%
12. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah : 98,68%
13. Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian : 54,96%
14. Program Kerjasama Pembangunan :82,19%
15. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : 87,36%
16. Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat : 81,93 %
17. Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat : 94,65 %
18. Program Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : 54,20%
19. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah : 95, 93%
20. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah: 63,26%

1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”** dan untuk mewujudkan visi diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, yaitu :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada paradigma reformasi birokrasi.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah.
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya

saing, perekonomian yang kokoh serta pembangunan infrastuktur berkelanjutan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun lalu dikaitkan dengan capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan acuan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan rencana strategis yang memuat isu-isu strategis dengan mempertimbangkan (1) Kekuatan, (2) Kelemahan, (3) Peluang dan (4) Tantangan. Karena itu dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa pelaksanaan pembangunan melalui penyusunan kebijakan dan



mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari pengimplementasian pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2019 yang terinterpretasikan menjadi visi dan misi. Adapun visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan. Dengan ditetapkannya kebijakan maka kebijakan yang telah ditetapkan itu merupakan arahan dan pedoman dalam pembuatan program. Sehingga dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dari program tersebut kemudian diimplementasikan menjadi kegiatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan.

Sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan tugas dan fungsi kesekretariatan yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, dapat dilihat melalui hasil evaluasi kinerja kegiatan yang diperoleh dari hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang implementasinya ditunjukkan dengan indikator pencapaian sasaran.

Dengan penilaian berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010, nilai realisasi kinerja bervariasi dan dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- sasaran sangat tinggi dicapai dengan nilai realisasi kinerja $\geq 91\%$
- sasaran tinggi dicapai dengan nilai realisasi kinerja antara 76% - 90%
- sasaran sedang dicapai dengan nilai realisasi kinerja antara 66% - 75%
- sasaran rendah dicapai dengan nilai realisasi kinerja < dari 51% - 65%
- sasaran sangat rendah dicapai dengan nilai realisasi kinerja $\leq 50\%$

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru memiliki 12 Indikator Kinerja Sasaran. Dari 12 indikator kinerja sasaran



terdapat 7 indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yaitu:

**Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (3,00)	BAGIAN PEMERINTAHAN	Tinggi (2,97)
2.	Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	BAGIAN HUKUM	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori Hijau (83,00)	BAGIAN ORGANISASI	Kategori Kuning (80,07)
		Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru	80,32		80,2
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	10	BAGIAN ORGANISASI	7,04
5.	Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	25%	BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN	25%
6.	Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah Penyelesaian Tata Batas Wilayah Antar Kelurahan dan atau Kecamatan	3 Wilayah	BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN	2 Wilayah

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Pencapaian sasaran tersebut merupakan tolok ukur atau sebagai indikator penilaian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Adapun sasaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**SASARAN 1
MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**



Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada paradigma reformasi birokrasi tergambar pada meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator atas pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peringkat nilai/skor terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penilaiannya berdasarkan atas evaluasi capaian realisasi indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori :

1. $3,00 < \dots \leq 4,00$ (sangat tinggi)
2. $2,00 < \dots \leq 3,00$ (tinggi)
3. $1,00 < \dots \leq 2,00$ (sedang)
4. $0,00 \leq \dots \leq 1,00$ (rendah)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama LPPD yaitu Indeks Capaian Kinerja (dengan bobot 95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (dengan bobot 5%).

- A. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan (dengan bobot 70% dari 95%) dan pada tataran Pelaksana Kebijakan (dengan bobot 30% dari 95%).



- I. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu :
 1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah (10%).
 2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12%).
 3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%).
 4. Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5%).
 5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%).
 6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%).
 7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%).
 8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%).
 9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%).
 10. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah (3%).
 11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (13%).
 12. Pengelolaan potensi daerah (5%).
 13. Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8%).

- II. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM.



- Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan (dengan bobot 40% dari 70%) yaitu:
 1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
 2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
 3. Penataan kelembagaan daerah (10%).
 4. Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
 5. Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
 6. Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
 7. Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
 8. Pemberian fasilitasi terhadap patisipasi masyarakat (10%)

- Penilaian aspek capaian kinerja (dengan bobot 60% dari 70%) dengan rincian:
 1. Untuk urusan wajib bobotnya 80% dari 60% terdiri dari 78 Indikator Kinerja Kunci (IKK):
 - a. Pendidikan (20%)
 - b. Kesehatan (15%)
 - c. Lingkungan Hidup (5%)
 - d. Pekerjaan Umum (5%)
 - e. Koperasi dan UKM (2%)
 - f. Perumahan (4%)
 - g. Ketahanan Pangan (2%)
 - h. Kependudukan dan Catatan Sipil (5%)
 - i. Tenaga Kerja (2%)
 - j. Perencanaan Pembangunan (5%)
 - k. Kepemudaan dan Olahraga (2%)
 - l. Penanaman Modal (2%)
 - m. Tata Ruang (3%)
 - n. Otonomi Daerah (2%)
 - o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (4%)



- p. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (2%)
- q. Perhubungan (2%)
- r. Komunikasi dan Informatika (2%)
- s. Pertanahan (1%)
- t. Kesatuan Bangsa dan Politik (2%)
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%)
- v. Sosial (3%)
- w. Budaya (3%)
- x. Statistik (1%)
- y. Kearsipan (2%)
- z. Perpustakaan (2%)
- 2. Untuk urusan pilihan bobotnya 20% dari 60% terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan :
 - a. Kelautan dan Perikanan (12,5%)
 - b. Pertanian (20%)
 - c. Kehutanan (12,5%)
 - d. Energi dan SDM (12,5%)
 - e. Pariwisata (12,5%)
 - f. Industri (12,5%)
 - g. Perdagangan (12,5%)
 - h. Transmigrasi (5%)
- B. Penilaian terhadap indeks kesesuaian materi dengan bobot 5% terdiri dari :
 - I. Desentralisasi (65%)
 - II. Tugas Pembantuan (20%)
 - III. Tugas Umum Pemerintahan (10%)
 - IV. Kelengkapan Laporan (5%)

Tabel. 3.3 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sangat Tinggi (3,00)	Sangat Tinggi (3,30)	110%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator Sasaran 1 (***Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah***) pada tahun 2018 (2019) adalah sebesar 110% yang berarti masuk dalam kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi TA. 2017 (2018)	Tahun Anggaran 2018 (2019)			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2018 (2019) terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi (2,98)	Sangat Tinggi (3,00)	Sangat Tinggi (3,30)	110%	Sangat Tinggi (3,00)	110%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2018 terhadap target telah mengalami sedikit kenaikan yaitu 110% (sangat tinggi) dibandingkan dengan kondisi pada Tahun Anggaran 2017 yang juga mendapat peringkat sangat tinggi (101%) dan tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) adalah sebesar 110%.

Hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2018, peringkat sementara kota Banjarbaru berada pada urutan 6 dengan skor 3,3018 (prestasi sangat Tinggi) untuk regional Kalimantan Selatan. Terjadi Peningkatan dibanding tahun 2017 yang berada di peringkat 7 dengan skor 3,0509 (prestasi Sangat Tinggi). Sementara untuk tahun 2016, Banjarbaru diposisi 12 dengan skor 2,9853 (prestasi tinggi).

Namun demikian penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional di tetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam



Negeri. Status LPPD kota Banjarbaru tahun 2018 secara Nasional akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020. LPPD Tahun 2017 Kota Banjarbaru berada pada peringkat 39 dengan skor 3.0546 dan predikat Sangat Tinggi secara Nasional, lebih baik jika dibandingkan dengan LPPD Tahun 2016 secara Nasional Kota Banjarbaru berada pada peringkat 64 dengan skor 2.9787 dan predikat tinggi.

Untuk status LPPD kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 secara Nasional baru akan di ketahui pada Tahun Anggaran 2020 pada peringatan Hari otonomi Daerah.

Data hasil evaluasi Tim Daerah EPPD propinsi Kalimantan Selatan terhadap LPPD kota Banjarbaru Tahun 2018 di bandingkan dengan tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

		Bobot	Skor Tahun TA.2017	Skor Tahun TA.2018
Skor Evaluasi KPPD		100%	3,0509	3,3018
A	Kesesuaian Materi	5%	3,0000	4,0000
B	Capaian Kinerja	95%	3,0536	3,2651
1	Tataran Pengambil Kebijakan	30%	3,6915	3,6390
a	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	10%	4,0000	3,5000
b	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	12%	3,7000	3,8000
c	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	22%	3,8000	3,9000
d	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	5%	4,0000	4,0000
e	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	3%	4,0000	4,0000
f	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	5%	4,0000	4,0000
g	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3%	4,0000	4,0000
h	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	5%	4,0000	4,0000
i	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	6%	3,3500	4,0000
j	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI	3%	2,0000	4,0000



		PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH			
k	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	13%	3,8500	3,0000	
l	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	5%	2,0000	2,5000	
m	TEROBOSAN INOVASI BARU	8%	3,2500	3,2500	
		100%			
2	Tataran Pelaksana Kebijakan	70%	2,780	3,1048	
a	Aspek Generik	40%	3,011	3,0719	
1)	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	12,50%	2,545	3,0758	
2)	KETAATAN THD PERATURAN / UU	7,50%	3,515	3,5152	
3)	PENATAAN KELEMBAGAAN	10,00%	2,942	3,3333	
4)	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	12,50%	2,676	2,6727	
5)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	17,50%	3,515	3,5152	
6)	PENGELOLAAN KEUANGAN	17,50%	2,389	2,2197	
7)	PENGELOLAAN BARANG MILIK	12,50%	3,515	3,5152	
8)	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	10,00%	3,297	3,1333	
b	Aspek SPM	60%	2,626	3,1268	
1)	Urusan Wajib	80%	2,742	3,1585	
2)	Urusan Pilihan	20%	2,237	3,0000	

Sasaran Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) didukung oleh Program **Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp.175.657.450,00**.

Permasalahan dan Kendala :

1. Pengumpulan Dokumen untuk mendukung Data Indikator Kinerja Kunci sering kali terlambat.
2. Di tingkat SKPD tidak jarang terjadi mutasi terhadap pejabat/pengelola data dan tidak meninggalkan arsip data secara rapi kepada penggantinya.
3. Masih terdapat penyampaian data yang tidak disertai dengan Dokumen Pendukung.

Solusi :

1. Dari sekretariat tim penyusun LPPD akan lebih intensif berkoordinasi dengan SKPD terkait progress pembuatan laporan tahunan.

2. Memperkuat Tim penyusun LPPD, khususnya koordinasi pada level sekretariat dan pengolah data.
3. Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pengisian Indikator Kinerja Kunci LPPD kepada semua SKPD.

Saran :

Untuk peningkatan skoring/peringkat LPPD secara nasional agar Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk senantiasa mengevaluasi secara berkala capaian kinerja yang menjadi indikator penilaian LPPD.

SASARAN 2

Mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada Sasaran Mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat indikator sasaran yaitu Prosentase Rancangan Produk hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menghasilkan Produk Hukum Daerah antara lain berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Produk Hukum Daerah tersebut menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta dibentuk dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat akan adanya produk hukum daerah tersebut.

Agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dan melanggar asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan produk hukum daerah, maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

tabel. 3.5 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100%	100%	100%

Dalam penyusunan produk hukum daerah pada tahun 2019 telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, produk hukum daerah yang dibuat menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan juga dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam tabel Realisasi Capaian Kinerja yang menunjukkan rata-rata realisasi capaian Indikator sasaran 2 (mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan), adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Pada Tahun 2019 telah diundangkan sebanyak 16 perda, 43 buah Peraturan Walikota.

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator sasaran mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100 %.



Permasalahan :

- Hasil Evaluasi di Kementrian memakan waktu yang cukup lama dan tidak bias diprediksi selesainya sehingga tertundanya pemberian nomor register Produk Hukum di Biro Hukum Provinsi.
- Ada sebagian SKPD belum secara aktif berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan belum memahami tentang hal-hal kegiatan yang perlu dibuatkan rancangan peraturan perundang-undangan/ produk hukum.
- Masih kurang aktifnya SKPD untuk mengusulkan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan/ produk hukum.
- Untuk pembuatan produk hukum daerah harus difasilitasi terlebih dahulu ke Biro Hukum Provinsi dan waktu penyelesaiannya tidak dapat ditentukan.

Solusi :

- Sering berkoordinasi dengan SKPD dan Biro Hukum Provinsi, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.
- Berinisiatif mengusulkan nomor register walaupun hasil evaluasi belum ditetapkan.
- Mengadakan sosialisasi / bintek tentang tata cara pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan/ produk hokum.
- Sering berkoordinasi dengan SKPD yang mengusulkan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan / produk hukum.
- Berinisiatif mengusulkan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan/ produk hukum kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Sasaran Mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini didukung oleh Program **Penataan Peraturan Perundang-undangan** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan** dengan anggaran sebesar **Rp.179.511.500,00**, **Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan** dengan anggaran **Rp.193.519.000,00** dan **Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan** dengan anggaran **Rp.206.400.000,00**.

**SASARAN 3
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK****Tabel. 3.7 Realisasi Capaian Indikator**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan	Nilai	Kategori Hijau (80,28)	Kategori Hijau (92,84)	115,56%
2	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,28	90,75	113,04%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah Sangat Tinggi (dicapai dengan nilai realisasi kinerja \geq 91%).

a. Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan

Dengan maksud untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam



memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2015 – 2019, Tim Monitoring Kota Banjarbaru melakukan penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan.

Penilaian tersebut dibatasi pada produk pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Penilaian kepatuhan adalah hasil rata-rata dari jumlah produk layanan di unit yang melakukan penelitian pelayanan publik. Dari hasil penilaian tersebut, ada 3 (tiga) kategorisasi *traffic light* yang menggambarkan tingkat



kepatuhan dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu :

- **Merah** untuk tingkat kepatuhan rendah (0-50)
- **Kuning** untuk tingkat kepatuhan sedang (51-80)
- **Hijau** untuk tingkat kepatuhan tinggi (81-100)

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 (Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/190/KUM/2019) Pada 62 (enam puluh dua) unit penyelenggaraan pelayanan di Kota Banjarbaru terdapat 53 (Lima Puluh Tiga) SKPD dan UPT yang termasuk dalam kategori **hijau**, 9 (Sembilan) masuk dalam ketegori **kuning** dan tidak ada yang masuk dalam kategori zona **merah**. Sedangkan Nilai rata-rata gabungan kota adalah 89,23 atau masuk dalam zona **hijau** dengan tingkat kepatuhan tinggi.

Menindaklajuti rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru, diselenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi Standar Pelayanan Publik.

Rekomendasi :

Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap standar pelayanan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru, kepada setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kota Banjarbaru agar mengimplementasikan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pubik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelaya/nan Publik.

Adapun langkah – langkah yang menjadi prioritas adalah :

- a. Perencanaan dan penganggaran responsif gender dan bagi kelompok rentan (disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial) untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh pelayanan;



- b. Melakukan pendampingan dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan;
- c. Melakukan evaluasi pada standar pelayanan yang ada;
- d. Perbaikan dalam manajemen kinerja dan manajemen sumber daya manusia;
- e. Melakukan evaluasi kapabilitas unit penyelenggara pelayanan publik;
- f. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia pemberi layanan pada level *front office*;
- g. Melakukan perubahan *mindset* ke arah kualitas pelayanan;
- h. Memberikan *reward* dan *punishment*;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan secara berkelanjutan.

b. Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter dengan fungsi utama melayani masyarakat, pemerintah Kota dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, setiap pembina dan penanggungjawab kinerja penyelenggarapelayanan publik wajib melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

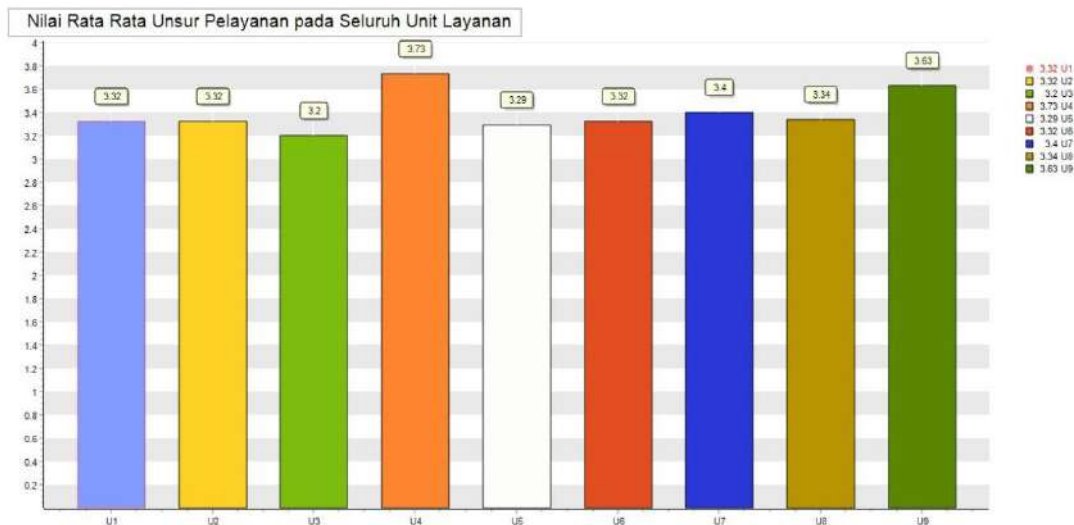
Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun 2019 dilaksanakan secara mandiri pada Semua SKPD di Kota Banjarbaru yang terdiri dari 20 (Dua Puluh) Kelurahan, 5 (lima) Kecamatan, 10 (tujuh) Puskesmas, dan 26 (dua

puluh enam) perangkat daerah lainnya. Responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan dengan rata-rata sebanyak 4.063 responden yang terdiri dari 1.967 laki-laki dan 2.096 Perempuan di Kota Banjarbaru.

Hasil survei menunjukkan secara umum kualitas pelayanan pada 61 (Enam Puluh Satu) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru memperoleh nilai rata-rata sebesar 84,82 dengan mutu pelayanan Kategori “Baik”. Adapun Nilai IKM tertinggi dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dengan nilai 90,75 (kinerja pelayanan Sangat Baik) sedangkan nilai pelayanan yang paling rendah yaitu pelayanan pada Puskesmas Landasan Guntung Manggis 77,08 (kinerja pelayanan Kurang Baik). Sedangkan nilai gabungan rata-rata unsur indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

NILAI GABUNGAN RATA- RATA UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



Rekomendasi :

Rekomendasi perbaikan pelayanan disusun berdasarkan prioritas, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dengan cara :

1. Secara umum, sebagian besar unsur pelayanan yang perlu diperbaiki dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat tersebut adalah unsur waktu pelayanan, persyaratan pelayanan, cara pelayanan dan prosedur pelayanan.

2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam pelayanan yaitu dengan meninjau kembali persyaratan dan prosedur yang telah ada, meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas, keramahan, sopan santun melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang prima.
3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas,
 - b. memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
4. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang serta mempertimbangkan untuk memberikan reward/penghargaan kepada unit pelayanan yang sudah melaksanakan pelayanan dengan sangat baik.

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2019	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori Kuning (65,12)	Kategori Hijau (80,28)	Kategori Hijau (92,84)	115,56%	Kategori Hijau (83,00)	100,91
2	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat	77,8 (IKM Terendah)	80,28	90,75	113,04%	80,32	103,69

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, capaian indikator nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan terealisasi sebesar 92,84 (Kategori Hijau) dengan prosentase capaian 115,56%. Untuk capaian indikator nilai indeks komposit survey kepuasan masyarakat terealisasi sebesar 90,75 dengan prosentase capaian 113,04%.

Permasalahan :

- Pemangku kepentingan pada unit penyelenggara pelayanan publik belum memahami apa yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut.

Solusi :

- Mengadakan rapat bersama tim dan unit penyelenggara pelayanan publik Banjarbaru.
- Melakukan pembinaan yang intensif.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik didukung oleh Program **Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik** dengan anggaran sebesar Rp.205.243.750,00.

**SASARAN 4
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Tabel. 3.9 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	Nilai	10	10,57	105%

Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, perhatian akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-4 yaitu “Melaksanakan Reformasi



Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Teknologi Informasi". Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain.

Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak. Dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat dilihat peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun penilaian terhadap indikator kinerja tersebut memiliki komponen yang dinilai dengan memiliki bobot penilaian meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja : 30 %
- b. Pengukuran Kinerja : 25 %
- c. Pelaporan Kinerja : 15 %
- d. Evaluasi Internal : 10 %
- e. Capaian Kinerja : 20 %

Hasil penilaian terhadap indikator kinerja dalam hal ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, memiliki 7 (tujuh) kategori Tingkat Akuntabilitas sebagai berikut :

- a. AA > 90 - 100 Sangat memuaskan
- b. A > 80 - 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
- c. BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
- d. B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
- e. CC > 50 - 60 Cukup (memadai) Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

- f. C > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
- g. D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang mendasar.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2019 sudah tercapai Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, yang telah berhasil dicapai (63,96) atau bernilai **kinerja baik (B)**. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenpan tahun 2019.

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	10,47	10	10,57	105%	15	70,46%



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memperoleh nilai **63,96** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Banjarbaru sudah menunjukkan hasil yang baik.

Apabila dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2018 lalu yang mendapat nilai 63,28 atau **B** yang termasuk dalam kategori tingkat akuntabilitas Baik, maka capaian kinerja pada tahun 2019 dapat dikatakan mengalami

kenaikan. Sehingga pada akhir tahun 2021 diharapkan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat terealisasi dengan memperoleh nilai A.

Adapun hasil evaluasi dari Kemenpan yaitu laporan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dan beberapa OPD telah menyajikan analisis pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Namun kualitas analisis capaian kinerja dan efisiensi masih perlu ditingkatkan dan informasi keuangan belum dikaitkan dengan pencapaian sasaran organisasi. Serta Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja level Pemerintah Daerah dan OPD tahun berjalan belum diunggah di *website*. Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dan OPD dengan menyajikan analisis yang memadai terkait penyebab tidak tercapainya target kinerja, sehingga informasi kinerja tersebut dapat diandalkan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang. Memastikan dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja level Pemerintah Daerah dan OPD tahun berjalan telah diunggah di *website* sebagai wujud transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada publik.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh Program **Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal** dengan anggaran sebesar **Rp. 202.751.000** dan Kegiatan **Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru** dengan anggaran sebesar **Rp.155.391.450**.

**SASARAN 5
MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM DAERAH**

Tabel. 3.11 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	%	25%	370%	1480%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator Sasaran 5 (***Meningkatnya implementasi kerjasama dalam daerah***) pada tahun 2019 adalah sebesar 370% atau masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Pada tahun 2019 terdapat 36 (tiga puluh enam) naskah MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang terdiri dari :

1. Kesepakatan Bersama (Mou) Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Nota Kesepahaman Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Banjarmasin Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tentang Penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
4. Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tentang Pensertifikatan Dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tentang Kerjasama Dibidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara.
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Pembentukan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar Kabupaten Banjar Menjadi Perseroan Terbatas (PT).





7. Kesepakatan Bersama Antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Peningkatan Pembangunan Di Kota Banjarbaru Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
8. Kesepakatan Bersama Antara Pt Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Kegiatan Promosi Pariwisata Kota Banjarbaru Di Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin.
9. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
10. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tambahan Kota Banjarbaru Tahun 2019.
11. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah Dan Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Perpajakan Daerah Kota Banjarbaru.
12. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2020.
13. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.
14. Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Serta Pengembangan Data Dan/Atau Informasi Statistik Dalam Rangka Perencanaan Dan Pembangunan Daerah.



15. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2019.
16. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019.
17. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Modern Banjarbaru.
18. Nota Kesepahaman Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Pengendalian Gratifikasi Yang Dianggap Suap Dalam Proses Pemeriksaan.
19. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Kepolisian Resort Banjarbaru, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah, Kantor Pos Banjarbaru 70700, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Banjarmasin, PT. BRI Cabang Martapura, Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dalam Gerai Pelayanan Publik Terpadu Kota Banjarbaru.
20. Nota Kesepahaman Antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Kerja Sama Pendidikan Dan Program Pendampingan Kepamongprajaan.
21. Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020.
22. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tentang Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Selatan.

23. Nota Kesepahaman Bersama Antara Balai Riset Dan Standardisasi Industri Banjarbaru Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Potensi Sumber Daya Alam Dan Alih Teknologi Di Kota Banjarbaru.
24. Adendum Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor 224/UN8.1.11/SP/2019 Dan Nomor 2/MOU/KDK/2019 Tentang Penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
25. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pemerintah Kabupaten Banjar Dan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Pengalihan/Konversi Aset Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pdam Intan Banjar Untuk Keberlanjutan Pembangunan Spam Regional Banjarbakula (Tahap II).
26. Nota Kesepahaman Tentang Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Internship Pemerintah Daerah Ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
27. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center For Entrepreneurship (Ok Oce Indonesia) Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
28. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan PT Samala Serasi Unggul (Rumah Siap Kerja) Tentang Kerjasama Di Bidang Platform Pelatihan, Ruang Pelatihan Dan Penyaluran Kerja.
29. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tentang Penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
30. Surat Perjanjian Tentang Perjanjian Pinjam Pakai Alat Berat.
31. Surat Perjanjian Tentang Perjanjian Pinjam Pakai Alat Ukur.





32. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan PT. Tiga Warna Promo Exhis Jakarta Tentang Kerjasama Pelaksanaan Banjarbaru Fair 2019.
33. Perjanjian Kerja Sama Antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Kegiatan Pendampingan Pengabdian Masyarakat.
34. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tentang Penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2039.
35. Perjanjian Kerja Sama Antara PT. PLN (persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan Dan Tengah UP3 Banjarmasin Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Banjarbaru.
36. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Internship Pemerintah Daerah Ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	64,7%	25%	370%	1480%	25%	1480%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, capaian indikator sasaran persentase naskah kerjasama aktif yang diimplementasikan terealisasi sebesar 370% dari target 25% dengan prosentase capaian 1480%. Capaian indikator tersebut dapat dikatakan lebih baik atau jauh lebih meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 64,7%.



Permasalahan :

- Masih terkendala dengan adanya perbedaan format Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pihak yang akan melakukan Kerja Sama.
- Banyak SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang memasukkan permohonan kerja sama dengan Pihak Lain dengan persyaratan/dokumen yang belum lengkap.
- Masih ada kendala tidak dapat dilakukannya pertemuan secara tatap muka terhadap Para Pihak yang akan bekerjasama dikarenakan jarak tempuh dan lokasi yang jauh dari tempat pertemuan.
- Tidak tercapainya Kesepakatan Kerja Sama antar Para Pihak yang bekerjasama karena ada hal-hal yang tidak disepakati bahkan tidak dapat dilaksanakan,

Solusi :

- Menyusun dan membuat format baku mengenai Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bagian Kerjasama dan Keagrariaan dengan Bagian Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan Informasi kepada SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pihak Lain ataupun Instansi terkait perihal persyaratan untuk melakukan kerja sama.
- Mencari Informasi yang lengkap mengenai apa saja isi dari kerja sama yang akan dilakukan.
- Melakukan pertemuan dan konsultasi sebelum melakukan kerja sama agar apa yang akan dikerjasamakan dapat dilaksanakan.

Sasaran Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam Daerah didukung oleh Program **Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik** dengan anggaran sebesar **Rp. 543.887.000,-**.

**SASARAN 6
MENINGKATNYA PENATAAN TATA BATAS WILAYAH
KOTA BANJARBARU**

Tabel. 3.13 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Penyelesaian tata batas wilayah antar Kelurahan dan atau Kecamatan	%	3 wilayah	18 wilayah	600%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator Sasaran 6 (***Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru***) pada tahun 2018 di karenakan telah diselesaikannya batas wilayah antar kelurahan dan atau kecamatan di Kota Banjarbaru yaitu sebanyak 20 kelurahan 5 kecamatan masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Pada tahun 2019 dilaksanakan perapatan pilar batas kelurahan yakni Kelurahan Gutung Paikat yang berbatasan dengan Kelurahan Sungai Besar, Kelurahan Kemuning dan Kelurahan Cempaka sebanyak 25 buah pilar batas dan telah terpasang pilar batas kelurahan tersebut.

Penegasan Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar telah menghasilkan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap Koordinat Pilar dan Titik Kartometrik menghasilkan sebanyak 140 Titik Pilar, 22 PBU dan 1 buah PABU. dimulai dari pertigaan batas daerah antara Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar yang berada di Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang sampai dengan batas daerah pertigaan antara Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar yang berada di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka. Wilayah Kota Banjarbaru yang Kelurahannya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bajar meliputi :

1. Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang
2. Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang
3. Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang
4. Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin
5. Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin

6. Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara
7. Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara
8. Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara
9. Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka

Dari hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kabupaten Banjar menjadikan dasar kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap penetapan Draf Permendagri dan Peta lampiran Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar. Draf permendagri dalam proses menjadi Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar.

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penyelesaian tata batas wilayah antar Kelurahan dan atau Kecamatan	18 wilayah	3 wilayah	18 wilayah (sama dengan th.2018)	600%	3 wilayah	600%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator sasaran **Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru** sebesar 100%.

Permasalahan :

- Draf Permendagri menjadi Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar terkendala prosedur di Kementerian Dalam Negeri.

Solusi :

- Perlu dilaksanakan konsultasi baik dengan Biro Perencanaan Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Administrasi Bina Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terbitnya permendagri tentang Penegasan Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar.

Sasaran Meningkatkan Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru didukung oleh Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Penataan dan



Penegasan Tata Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 235.638.750.-

➤ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019, telah dilaksanakan program dan kegiatan yang di anggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 39.522.799.223,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.235.315.492,- (94,21%). Untuk mengetahui pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 terhadap penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		CAPAIAN
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (3,00)	Sangat Tinggi (3,30)	110%	175.657.450	170.617.450	97,13%
Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	579.430.500	554.983.500	95,59 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori Hijau (81,00)	Kategori Hijau (92,84)	115,56%	210.097.500	179.607.500	85,53 %
	Nilai Indeks	80,28	90,75	113,04%	205.243.750	195.723.750	95,36 %



	Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	10	10,57	105%	358.142.450	351.115.200	98,03 %
Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	25%	370%	1480%	543.887.000	521.756.400	95,93 %
Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah Penyelesaian tata batas wilayah antar Kelurahan dan atau Kecamatan	3 wilayah	18 wilayah	600%	908.779.850	574.454.210	63,21 %

Guna mencapai hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas keuangan perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja kegiatan dalam bentuk rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektifitas yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi rasio ekonomi, maka ditentukan pemeringkatan (*Scoring*) sebagai berikut :

Rasio Ekonomi	Skor	Kesimpulan
< 90%	5	Sangat Ekonomis
90% - 94,99%	4	Ekonomis
95% - 100%	3	Cukup Ekonomis
100% - 105%	2	Kurang Ekonomis
>105%	1	Tidak Ekonomis

2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rasio Ekonomi}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari berbagai variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian ditetapkan pemeringkatan nilai sebagai berikut :

Rasio Efisien	Skor	Kesimpulan
$\leq 96\%$	4	Efisiensi
96% - 100%	3	Cukup Efisien
101% - 105%	2	Kurang Efisien
$>105\%$	1	Tidak Efisien

3. Rasio Efektivitas, merupakan nilai perbandingan antara capaian kinerja *output* dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Output}}{\text{Capaian Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

Selanjutnya guna penetapan efektivitas sesuai nilai rasio yang diperoleh, ditetapkan pemeringkatan nilai rasio sebagai berikut :

Rasio Efektivitas	Skor	Kesimpulan
$> 100\%$	4	Efektif
95% - 100%	3	Cukup Efektif
90% - 94,99%	2	Kurang Efektif
$<90\%$	1	Tidak Efektif



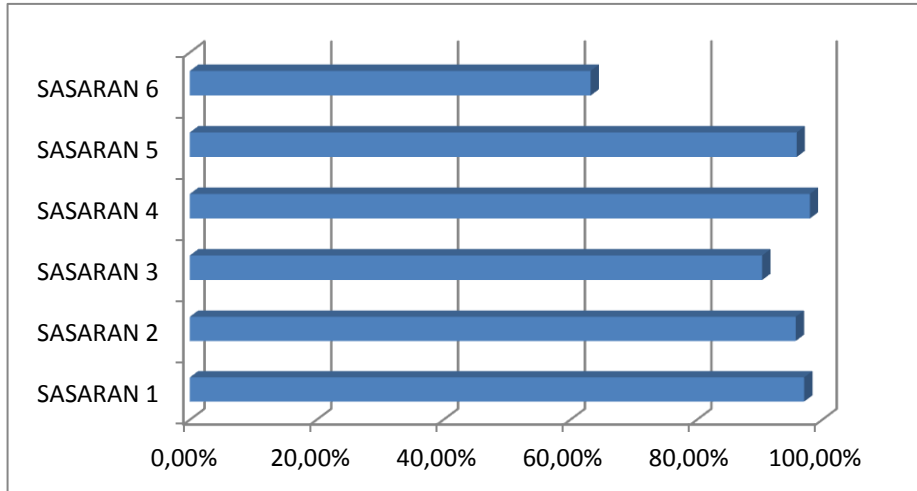
Capaian Rasio Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Capaian Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

SASARAN	ANGGARAN 2019 (RP.)	REALISASI 2019 (RP.)	RASIO EKONOMI	RASIO EFISIENSI	RASIO EFEKTIVITAS
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	175.657.450	170.617.450	97,13 %	88,30 %	100 %
Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	579.430.500	554.983.500	95,78 %	95,78 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	210.097.500	179.607.500	85,48 %	73,97 %	100 %
	205.243.750	195.723.750	95,36 %	84,35 %	100 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	358.142.450	351.115.200	98,03 %	93,36 %	100 %
Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	543.887.000	521.756.400	95,93 %	6,48 %	100 %
Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	908.779.850	574.454.210	63,21 %	10,53 %	100 %

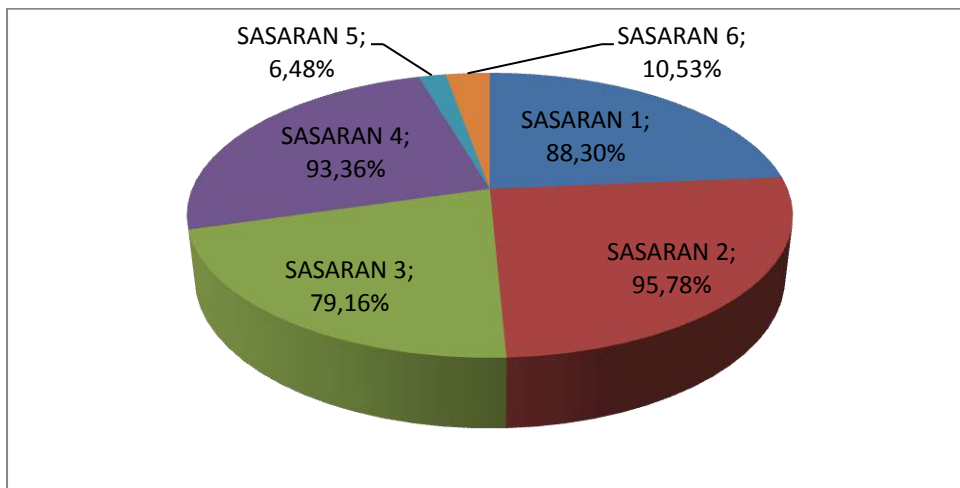
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 3 dan 6 mencapai nilai **SANGAT EKONOMIS**, pada Sasaran 1,2,3,4 dan 5 mencapai nilai **CUKUP EKONOMIS**.

RASIO EKONOMI



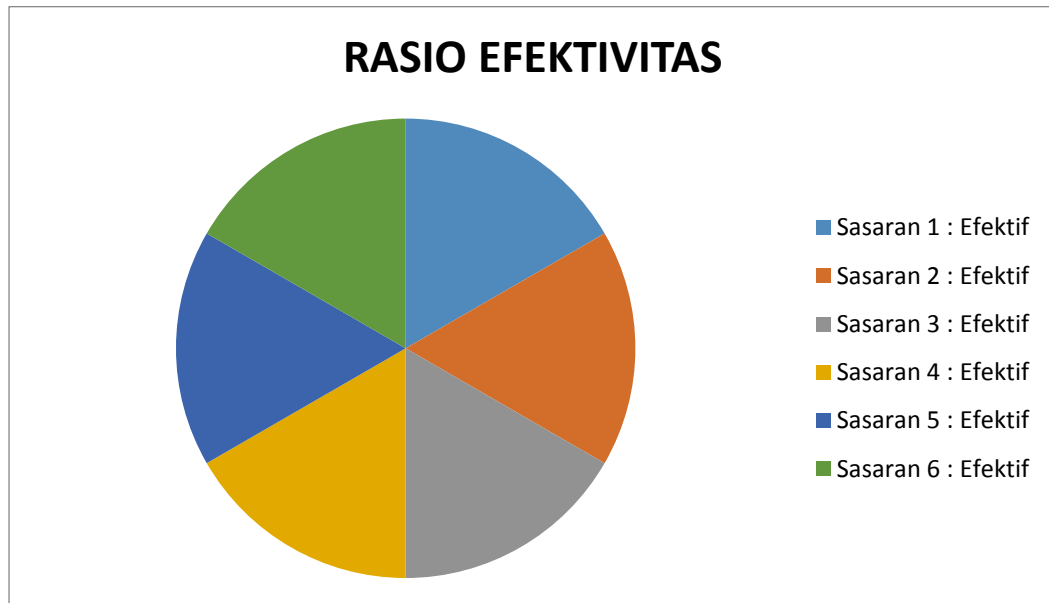
Terkait Rasio Efisiensi, pada tabel 3.16 dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1,2,3,4,5,dan 6 mencapai kategori **EFISIEN**.

RASIO EFISIENSI



Program yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2019, secara umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam bentuk Rasio Efektivitas.

Dari tabel 3.16 disimpulkan bahwa pelaksanaan program untuk mewujudkan Sasaran 1,2,3,4,5,dan 6 mencapai Kategori **EFEKTIF**.



B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 adalah sebesar **94,21%** dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (98,03%)***. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ***Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru (63,21%)***.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat disajikan pada grafik dan tabel berikut ini :



Tabel. 3.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	175.657.450	170.617.450	97,13%
2.	Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	579.430.500	554.983.500	95,59 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	210.097.500	179.607.500	85,53 %
		Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru	205.243.750	195.723.750	95,36 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	358.142.450	351.115.200	98,03 %
5.	Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	543.887.000	521.756.400	95,93 %
6.	Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah Penyelesaian tata batas wilayah antar Kelurahan dan atau Kecamatan	908.779.850	574.454.210	63,21 %

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada paradigma reformasi birokrasi.

Tujuan : a. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
: 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan : b. Meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran : 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
: 2. Meningkatnya aparatur yang kompeten dan berjiwa melayani.

Tujuan : c. Optimalisasi kelembagaan, tata laksana dan akuntabilitas.

Sasaran : Penguatan ketata laksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Tujuan : d. Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur.

Sasaran : Mengembangkan kompetensi aparatur.

Tujuan : e. Peningkatan kesadaran hukum.

Sasaran : Melaksanakan penataan perundang-undangan.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah.

Tujuan : a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran : Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Tujuan : b. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran : Meningkatnya kerukunan berbasis adat dan agama.

Tujuan : c. Meningkatkan kualitas layanan, administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.



Sasaran : Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Tujuan : Membangun pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Sasaran : Meningkatnya hubungan kerja.

B. Program dan Kegiatan

1. Program

Program Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- f. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
- g. Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan
- h. Program Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- i. Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
- j. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
- k. Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
- l. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- m. Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.
- n. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- o. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.



- p. Program Penataan Peraturan Perundang –undangan
- q. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
- r. Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian
- s. Program Kerjasama Pembangunan

2. Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan perkembangan pada tingkat implementasi dan memperhatikan perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 maka disusunlah rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. BAGIAN UMUM

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c). Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f). Penyediaan Makanan dan Minuman
- g). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- h). Penyediaan Jasa Non PNS

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a). Pembangunan Gedung Kantor
- b). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d). Pengadaan Mebeleur
- e). Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- f). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- g). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- h). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- i). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



- j). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - k). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - l). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - m). Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - n). Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat
 - o). Pengamanan Gedung Kantor
- 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- a). Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b). Pengadaan Pakaian Adat
- 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b). Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 - c). Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset /Barang
- a. BAGIAN HUKUM**
- 5). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**
- a). Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
 - b). Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - c). Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - d). Publikasi Peraturan Perundang-undangan
 - e). Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
 - f). Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi.
 - g). Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM
 - h). Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Sadar Hukum



b. BAGIAN PEMERINTAHAN

- 1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah**
 - a). Dialog /Audiensi Dengan tokoh –tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
 - b). Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2). Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah**
 - a). Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional
- 3). Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan.**
 - a). Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
 - b). Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya

c. BAGIAN ORGANISASI

- 1). Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah**
 - a). Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b). Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
 - c). Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- 2). Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan**
 - a). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru
 - b). Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
 - c). Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
 - d). Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - e). Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan & Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD
 - f). Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan



d. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

1). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

- a). Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
- b). Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- c). Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan
- d). Publikasi Kegiatan Pimpinan
- e). Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

e. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah

- a). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2). Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian

- a) Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM
- b) Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
- c) Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi
- d) Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah
- e) Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian
- f) Koordinasi Pelaksanaan Administratif Perekonomian Daerah dan Perbankan

3). Program Kerjasama Pembangunan

- a) Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha.



f. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

- a). Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
- b). Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya
- c). Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
- d). Fasilitasi Bantuan Sosial
- e). Pembinaan dan Pengembangan UKS

2). Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

- a). Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan

3). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- a). Pelaksanaan Santunan Kematian
- b). Pelaksanaan Rukun Kematian

g. BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- a) Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

- a) Pembakuan Nama Rupa Bumi
- b) Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah
- c) Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah

h. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1). Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa

- a) Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b) Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c) Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa



Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban Stakeholder pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya media akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang dapat menjadi alat oleh pihak yang memberi kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.

Perlunya akuntabilitas semakin mencuat seiring dengan tuntutan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB IV

KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2020

A. Kerangka Regulasi

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pelaksanaan azas desentralisasi pada era otonomi daerah didasarkan pada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Negara Nomor 4262) kemudian diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah kemudian dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang antara lain meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Dalam mengemban Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maka program yang ditetapkan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kerangka Regulasi pada masing-masing Program merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai Landasan Yuridis dan Dasar Kebijakan dalam mencapai pelaksanaan Rencana Strategis.

B. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah

Dalam menentukan kerangka anggaran untuk tahun 2020 dilakukan dengan sistem penganggaran terpadu (*unified budgeting*) dimana penyusunan rencana anggaran tahun 2020 dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mengelola alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendanaan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan keproyekan yang disesuaikan dengan unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja guna mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.



Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pendanaan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan keproyekan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Banjarbaru sebesar **Rp. 32.684.093.905,-**

Sebagai salah satu Instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru berkewajiban dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku, dalam rangka tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maka dilaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian daerah maupun kegiatan yang ditujukan kepada aparatur lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka peningkatan kemampuan, keterampilan maupun wawasan, sehingga aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna menuju pemerintahan yang baik.

Pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merencanakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Pada pelaksanaan kegiatan belanja langsung tersebut dilaksanakan sesuai dengan bagianya masing-masing.

Berdasarkan anggaran yang disediakan untuk SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru besarnya anggaran masing-masing bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.2.
Rekapitulasi Belanja Langsung Masing-Masing Unit Kerja

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU		32.684.093.905
1.20.03.01	BAGIAN UMUM	17.575.148.355
1.20.03.02	BAGIAN HUKUM	1.560.403.500
1.20.03.03	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.291.743.700
1.20.03.04	BAGIAN ORGANISASI	1.182.523.150
1.20.03.05	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	4.756.424.000
1.20.03.06	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.327.445.450
1.20.03.07	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.801.018.450
1.20.03.08	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	230.420.400
1.20.03.09	BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN	958.966.900

Penetapan Kinerja dan anggaran masing-masing kegiatan untuk Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada lampiran.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru ini merupakan operasionalisasi visi, misi, dan strategi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2020, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru akan melaksanakan 19 program dan 79 kegiatan. Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, direncanakan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebesar **Rp. 32.684.093.905,-** (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
SKPD : SEKRETARIAT KOTA BANJARBARU**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU				100%	32.609.363.905			100%	32.609.363.905
I.	SETDAKO - BAGIAN UMUM			100%	17.642.468.355			100%	17.642.468.355
I.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Usulan Kepegawaian Tepat Waktu		100%	12.748.937.205			100%	12.748.937.205
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru		1.858.000.000	APBD			1.858.000.000
		- Jasa Telepon		1 Tahun				1 Tahun	
		- Jasa Sumber Daya Air		1 Tahun				1 Tahun	
		- Jasa Listrik		1 Tahun		-		1 Tahun	
		- Langganan Internet		1 Tahun				1 Tahun	
		- TV Kabel		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Banjarbaru	1 tahun	319.600.000	APBD		1 tahun	319.600.000
		Jasa petugas kebersihan kantor		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor :		12 bulan	188.236.000			12 bulan	188.236.000
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		31 macam				31 macam	
		Tersedianya materai :							
		Materai 3000		3.000 lembar				3.000 lembar	
		Materai 6000		3.744 lembar				3.744 lembar	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	175.000.000			12 bulan	175.000.000
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan :							
		- Jenis cetakan		22 macam				22 macam	
		- Penggandaan		340.000 Imbr				340.000 Imbr	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih :	Banjarbaru	12 bulan	1.195.879.830	APBD		12 bulan	1.195.879.830
		- Pengadaan Plakat/Souvenir		1 paket				1 paket	
		- Dekorasi Kegiatan/Acara		12 bulan/ 1 Tahun/ 1 Paket/				12 bulan/ 1 Tahun/ 1	
		- Pengadaan Papan Petunjuk Ruang		20 buah				20 buah	
		- Pengadaan Perlengkapan Komputer		12 bulan				12 bulan	
		- Sewa Tenda, Meja Kursi, Tanaman Kantor, AC/Blower, Sewa audio/video/lihtting		12 bulan/ 1 Tahun/ 1 Kegiatan				12 bulan/ 1 Tahun/ 1 Kegiatan	
		- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		12 bulan/ 1 Tahun/ 1 Paket/ 60 Buah				12 bulan/ 1 Tahun/ 1 Paket/ 60	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu :	Banjarbaru	12 bulan	3.406.211.355	APBD		12 bulan	3.406.211.355
		- Bahan Makanan dan Minuman KDH dan WKDH		12 bulan				12 bulan	
		- Makanan dan Minuman Harian Pegawai		64.880 porsi				64.880 porsi	
		- Makanan dan Minuman Rapat		675 porsi				675 porsi	
		- Makan Minum Rapat		700 kotak				700 kotak	
		- Makanan dan Minuman Operasional Lapangan		4.000 kotak				4.000 kotak	
		- Makanan dan Minuman Tamu		12 bulan				12 bulan	
		- Makan Minum Tamu Acara Tertentu		60.690 kotak				60.690 kotak	
		- Makan Minum Tamu Acara Tertentu		60.680 porsi				60.680 porsi	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah :	Banjarbaru	12 bulan	4.119.450.020	APBD		12 bulan	4.119.450.020
		- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Tahun				1 Tahun	
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Tahun				1 Tahun	
		- Perjalanan Dinas Luar Negeri		1 Tahun				1 Tahun	
		Kontribusi pelatihan/kursus/bimtek bagi aparatur setda		1 Tahun				1 Tahun	

		Kontribusi APEKSI, FORSESDASI, dan CITYNET		1 Tahun			1 Tahun	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa non PNS	Banjarbaru		1.486.560.000	APBD		1.486.560.000
		Pegawai Tidak Tetap (PTT)		12 orang			12 orang	
		Pegawai Kontrak		73 orang			73 orang	
I.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar		100%	4.403.374.400		100%	4.403.374.400
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik :	Banjarbaru		110.500.000	APBD		110.500.000
		Pengadaan Proyektor		4 unit			4 unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	-	-	APBD	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik :	Banjarbaru		186.020.000	APBD		186.020.000
		Pengadaan AC		1 paket			1 paket	
		Pengadaan Komputer/PC		1 paket			1 paket	
		Pengadaan Printer		20 unit			20 unit	
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	Banjarbaru		217.162.000	APBD		217.162.000
		Pengadaan Kursi Kerja		1 paket			1 paket	
		Pengadaan Lemari Arsip		20 unit			20 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan rutin rumah jabatan	Banjarbaru	12 bulan	179.600.000	APBD	12 bulan	179.600.000
		Jasa kebersihan rumah jabatan/dinas		12 bulan			12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	Banjarbaru		274.622.400	APBD		274.622.400
		Jumlah mobil jabatan KDH & WKDH yang melakukan pemeliharaan		2 buah			2 buah	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik :	Banjarbaru		1.500.000.000	APBD		1.500.000.000
		- Kendaraan Roda 2		74 unit			74 unit	

I.4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Setda		BB	170.756.750			BB	170.756.750
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindalanjuti		100%				100%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik		100%				100%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	Banjarbaru	7 dok	102.576.000	APBD		7 dok	102.576.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Banjarbaru	1 Dok	51.624.500	APBD		1 Dok	51.624.500
		Waktu penyelesaian SPM dinyatakan lengkap dan sah tepat waktu		1 hari				1 hari	
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Kesesuaian BMD SKPD	Banjarbaru	100%	16.556.250	APBD		100%	16.556.250
		Jumlah laporan inventarisasi barang tepat waktu		4 dokumen				4 dokumen	
II.	SETDAKO - BAGIAN HUKUM			100%	1.275.553.500			100%	1.275.553.500
II.1.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			100%	1.275.553.500			100%	1.275.553.500
		Prosentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dan Sinkron dengan Peraturan perUndang-Undangan dan Kebutuhan Masyarakat		100%				100%	
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan	- Evaluasi Perda	Banjarbaru	9 perda	199.220.500	APBD		9 perda	199.220.500
		- Fasilitasi Perwali		15 perwali				15 perwali	
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan	Tersusnya Raperda	Banjarbaru	9 Raperda	217.270.500	APBD		9 Raperda	217.270.500
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusnya naskah akademik Raperda	Banjarbaru	4 Naskah Akademik	206.400.000	APBD		4 Naskah Akademik	206.400.000
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terpublikasikannya/Tersebarluaskannya produk hukum melalui :	Banjarbaru		122.378.500	APBD			122.378.500
		a. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum		5 Kali				5 Kali	
		b. Sosialisasi Pembinaan Kelurahan dan Kelompok Sadar Hukum		5 Kali				5 Kali	
		c. Media Cetak		5 Jenis				5 Jenis	
	Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Banjarbaru	8 Perkara	256.310.500	APBD		8 Perkara	256.310.500
	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	Terlaksananya sosialisasi RANHAM	Banjarbaru	3 kali	66.083.500	APBD		3 kali	66.083.500
	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Banjarbaru		52.522.500	APBD			52.522.500

		a. Sistem Online		1 Buah Website				1 Buah Website	
		b. Sistem Offline		1 Buah Anjungan Informasi				1 Buah Anjungan	
	Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Sadar Hukum	Meningkatnya Kadar Kesadaran Hukum dan terwujudnya Budaya Hukum Masyarakat melalui Kadarkum dan Kelurahan Sadar Hukum	Banjarbaru	5 kali	155.367.500			5 kali	155.367.500
III.	SETDAKO - BAGIAN PEMERINTAHAN			100%	1.261.543.700			100%	1.261.543.700
III.1.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Sangat Tinggi	404.533.950			Sangat Tinggi	404.533.950
		Persentase Kelurahan Berkinerja Baik		100%				100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	1 Dokumen	175.657.450	APBD		1 Dokumen	175.657.450
		Dokumen Rekapitulasi Laporan Rakor Unit Kerja		1 Dokumen				1 Dokumen	
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Annggota Organisasi	Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan / Annggota	Banjarbaru	5 Kali	228.876.500	APBD		5 Kali	228.876.500
III.2.	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah		100%	654.958.500			100%	654.958.500
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Banjarbaru	2 Kali	495.342.500	APBD		2 Kali	495.342.500
	Pelaksanaan Desk Pilkada tahun 2020	Terlaksananya Desk Pilkada tahun 2020	Banjarbaru	2 kali	159.616.000	APBD		2 kali	159.616.000
III.3.	Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Terbina Administrasinya		100%	202.051.250			100%	202.051.250
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Jumlah Peserta Rakor Bulanan Camat dan Lurah untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan se Kota Banjarbaru	Banjarbaru		103.595.250	APBD			103.595.250
		Jumlah Kecamatan		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
		Jumlah Kelurahan		12 Kali				12 Kali	
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya :	Banjarbaru		98.456.000	APBD			98.456.000
		Jumlah Kecamatan		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
		Jumlah Kelurahan		20 Kelurahan				20 Kelurahan	

IV.	SETDAKO - BAGIAN ORGANISASI			100%	1.182.523.150			100%	1.182.523.150
IV.1.	Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		100%	302.546.500			100%	302.546.500
	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian	Banjarbaru	1 Kegiatan	42.895.000	APBD		1 Kegiatan	42.895.000
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja	Banjarbaru	25 Dokumen	139.820.000	APBD		25 Dokumen	139.820.000
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana	Banjarbaru	1 Kegiatan	119.831.500	APBD		1 Kegiatan	119.831.500
IV.2.	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat		Sangat Baik	879.976.650			Sangat Baik	879.976.650
		Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan		Hijau (81,00)				Hijau (81,00)	
		Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru Komponen Pelaporan Kinerja		B				B	
	Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Penyusunan Laporan Kinerja	Banjarbaru	1 Dokumen	112.215.000	APBD		1 Dokumen	112.215.000
		Laporan Perjanjian Kinerja		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan Standar Pelayanan Minimal		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang sesuai juknis pelaporan		34 SKPD				34 SKPD	
	Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru	Dokumen Reformasi Birokrasi		1 kegiatan	155.391.400			1 kegiatan	155.391.400
		Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Banjarbaru	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
		Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Organisasi		1 kegiatan				1 kegiatan	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Banjarbaru	1 Dokumen	202.543.750	APBD		1 Dokumen	202.543.750
		Dokumen SKM Kota Banjarbaru		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
		Dokumen Proposal Sinovik		1 Kegiatan				1 Kegiatan	

	Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah SKPD yang mempunyai Peta Proses Bisnis	Banjarbaru	5 SKPD	76.054.500	APBD		5 SKPD	76.054.500
		Jumlah SKPD yang mempunyai SOP		5 SKPD				5 SKPD	
	Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan yang diperbaharui	Banjarbaru	1 Peraturan/Keputusan Walikota	126.434.000	APBD		1 Peraturan/Keputusan	126.434.000
		Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang dicetak		1000 Buah				1000 Buah	
	Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan	Banjarbaru	25 Dokumen	207.338.000	APBD		25 Dokumen	207.338.000
V.	SETDAKO - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			100%	4.756.424.000			100%	4.756.424.000
V.1.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Acara Keprotokolan Sesuai Dengan Standar dan Aturan Yang Berlaku		100%	4.756.424.000			100%	4.756.424.000
		Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		100%				100%	
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Pelaksanaan Keprotokolan dan Acara Pemerintah Daerah berupa Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	Banjarbaru	35 Kali	296.880.000	APBD		35 Kali	296.880.000
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Acara Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Banjarbaru	500 Kegiatan	337.698.000	APBD		500 Kegiatan	337.698.000
	Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/ Sekda kedinasan yang diliput dan didokumentasikan	Banjarbaru	12 bulan/ 620 Kegiatan	429.320.000	APBD		12 bulan/ 620 Kegiatan	429.320.000
	Publikasi kegiatan pimpinan	Terlaksananya acara kedinasan Kepala Daerah yang di publikasikan	Banjarbaru	12 bulan/ 550 Kegiatan	1.127.397.000	APBD		12 bulan/ 550 Kegiatan	1.127.397.000
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Informasi acara kedinasan yang di sebarluaskan melalui media cetak dan elektronik	Banjarbaru	12 bulan	2.565.129.000	APBD		12 bulan	2.565.129.000
VI.	SETDAKO - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			100%	1.327.445.450			100%	1.327.445.450
VI.1.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan		32 SKPD	1.021.701.300			32 SKPD	1.021.701.300
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Banjarbaru	4 kali	1.021.701.300	APBD		4 kali	1.021.701.300
		- Jumlah Dokumen Data Informasi Bahan Kebijakan		3 Dokumen				3 Dokumen	

		- Tim Sinergi Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan		7 Bulan				7 Bulan	
		- Jumlah Pengendalian Paket Pekerjaan		100 Paket Pekerjaan				100 Paket Pekerjaan	
VI.2.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang perekonomian Walikota Banjarbaru		1 Kebijakan/ Rekom	224.837.350			1 Kebijakan/ Rekom	224.837.350
	Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	Jumlah Rapat Peningkatan koordinasi pengembangan UKM	Banjarbaru	8 kali	33.329.150	APBD		8 kali	33.329.150
	Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	Buku Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	Banjarbaru	30 Buku	12.774.500	APBD		30 Buku	12.774.500
		Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah		2 Laporan				2 Laporan	
	Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	Terfasilitasinya Penyusunan Naskah Kajian Investigasi untuk Penyertaan Modal	Banjarbaru	1 Naskah	58.724.500	APBD		1 Naskah	58.724.500
		Rapat Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha		2 Laporan				2 Laporan	
	Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	- Jumlah rapat koordinasi TPID Kota Banjarbaru	Banjarbaru	8 Kali	84.188.200	APBD		8 Kali	84.188.200
		- Tercapainya penyusunan laporan kegiatan TPID Kota Banjarbaru		4 Kali				4 Kali	
	Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rakor Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Banjarbaru	6 kali	35.821.000	APBD		6 kali	35.821.000
		Rakor Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan		4 kali				4 kali	
VI.3.	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota Banjarbaru		2 Perusahaan/ Lembaga Pendonor	80.906.800			2 Perusahaan/ Lembaga Pendonor	80.906.800
	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	Jumlah Kemitraan Pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota	Banjarbaru	4 Perusahaan	80.906.800	APBD		4 Perusahaan	80.906.800
VII.	SETDAKO - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			100%	3.801.018.450			100%	3.801.018.450
VII.1.	Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan		100%	2.556.423.050			100%	2.556.423.050
	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam	Banjarbaru	2 Kali	2.556.423.050	APBD		2 Kali	2.556.423.050
		Jumlah Safari/Silahturahmi dan Ta'mir Ramadhan		21 Kali				21 Kali	

		Jumlah Safari Jumat Bersama Walikota & Wakil Walikota Banjarbaru		40 Kali				40 Kali	
		Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Banjarbaru dan Tingkat Provinsi		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
		Jumlah Pelaksanaan Ibadah Haji		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
		Jumlah Pelaksanaan Pembagian Honorarium Peyugas Kebersihan Rumah Ibadah Muslim dan Non Muslim		2 Kali				2 Kali	
		Jumlah Pelaksanaan Training Center		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
		Jumlah Tenaga Petugas Haji Daerah		1 Orang				1 Orang	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BKPRMI		12 Kegiatan				12 Kegiatan	
VII.2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Fasilitas Pelayanan Santunan dan Bantuan Rukun Kematian		100%	90.585.000			100%	90.585.000
	Pelaksanaan Rukun Kematian	Jumlah Dokumen Rukun Kematian	Banjarbaru	1 Dokumen Rukun Kematian	90.585.000	APBD		1 Dokumen Rukun Kematian	90.585.000
		Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan Jenazah		5 Kali				5 Kali	
		Jumlah Sosialisasi Perwali Rukun Kematian		3 Kali				3 Kali	
VII.3	Program Peningkatan Kinerja Administratif Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat		100%	1.154.010.400			100%	1.154.010.400
		Persentase Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat		100%				100%	
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Kesehatan, Pertanian dan KB dengan SKPD dan Stackholder Terkait	Banjarbaru	1 kali	337.768.500	APBD		1 kali	337.768.500
		Terlaksananya Koordinasi dengan Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru, LPM serta Stackholder Terkait		1 kali				1 kali	
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	Terlaksananya Silaturahmi dan Pengembangan Sosial Budaya dengan Seniman, Budayawan dan Pelaku Seni	Banjarbaru	1 kali	631.806.000	APBD		1 kali	631.806.000
		Terlaksananya Silaturahmi dan Pengembangan Sosial Budaya dengan Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat &		8 kali				8 kali	

		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra		66 kali				66 kali	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Silaturahmi Pemberdayaan Masyarakat	Banjarbaru	3 kali	38.916.000	APBD		3 kali	38.916.000
		Jumlah Bimtek dan Koordinasi dengan para Camat, Lurah, dan Kasi Kessos Kelurahan se Kota Banjarbaru		2 kali				2 kali	
	Fasilitasi Bantuan Sosial	Jumlah Sosialisasi Peraturan tentang Bantuan Sosial dan Hibah	Banjarbaru	10 kali	96.508.400	APBD		10 kali	96.508.400
	Pembinaan dan Pengembangan UKS	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	Banjarbaru	4 kali	49.011.500	APBD		4 kali	49.011.500
VIII.	SETDAKO - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			100%	403.420.400			100%	403.420.400
VIII.1.	Program Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Bagian PBJ		100%	403.420.400			100%	403.420.400
	Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah evaluasi dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah	Banjarbaru	4 kali/ 4 Laporan /1 Laporan Tahunan	48.575.000	APBD		4 kali/ 4 Laporan /1 Laporan Tahunan	48.575.000
	Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah SKPD yang Terlayani dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Banjarbaru	34 SKPD	90.685.400	APBD		34 SKPD	90.685.400
	Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang terlayani dalam bidang Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	34 SKPD	91.160.000	APBD	Banjarbaru	34 SKPD	91.160.000
	Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten/Kota (LPSE)	Jumlah SKPD yang terlayani dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Banjarbaru	34 SKPD	173.000.000	APBD	Banjarbaru	34 SKPD	173.000.000
IX.	SETDAKO - BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN			100%	958.966.900			100%	958.966.900
IX.1.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan		25%	148.391.800			25%	148.391.800
	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Naskah Kerjasama Aktif Antar Daerah yang di Implementasikan	Banjarbaru	100 Naskah	148.391.800	APBD		100 Naskah	148.391.800
		Jumlah Pertemuan APEKSI regional dan nasional		4 Kali				4 Kali	
IX.2.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Penyelesaian Tata Batas Wilayah antar Kelurahan dan Atau Kecamatan		3 Wilayah	810.575.100			3 Wilayah	810.575.100
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Dokumen Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi	Banjarbaru	1 Dokumen	63.639.000	APBD		1 Dokumen	63.639.000

	Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	Tertatanya batas wilayah administrasi kelurahan se Kota Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	207.250.500	APBD		1 Dokumen	207.250.500
		Kelurahan yang sudah ditetapkan & ditegaskan batas wilayah		4 Kelurahan				4 Kelurahan	
		Terpasangnya patok batas & Grafier		25 Buah				25 Buah	
	Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah	Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah pemko	Banjarbaru	16 Kali	539.685.600	APBD		16 Kali	539.685.600
		Sosialisasi masalah pertanahan		1 Kali				1 Kali	
		Dokumen Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Menghibahkan Tanah		150 Sertifikat				150 Sertifikat	
		Pembuatan patok pengamananan tanah		10 Buah				10 Buah	
		Pembuatan papan nama pengamananan tanah		10 Buah				10 Buah	

Banjarbaru,

2019

Sekretaris Daerah,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2020
SKPD : SEKRETARIAT KOTA BANJARBARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Keg a/b/c
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.01.4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU							100%	100%	32.684.093.905	27.460.485.617	(5.223.608.288)					
4.01.4.01.03.01	SETDAKO - BAGIAN UMUM							100%	100%	17.575.148.355	17.691.726.857	116.578.502					
4.01.4.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase usulan kepegawalan tepat waktu					100%	100%	12.753.617.205	12.744.290.757	(9.326.448)					
4.01.4.01.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Lingkungan Setdako Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	1.858.000.000	2.108.000.000	250.000.000	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Lingkungan Setdako Banjarbaru	Lingkungan Setdako Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	10 orang	10 orang	319.600.000	306.875.000	(12.725.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Banjarbaru	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	188.236.000	188.236.000	-					
4.01.4.01.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	175.000.000	175.000.000	-					
4.01.4.01.03.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	1.195.879.830	884.278.382	(311.601.448)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	3.406.211.355	3.406.211.355	-	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	KDH, WKDH, Sekda, dan Aparatur Setda	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	4.184.250.020	4.249.250.020	65.000.000	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa non PNS	Tersedianya jasa non PNS	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	PTT dan Tenaga Kontrak Lingkup Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	83 orang	83 orang	1.426.440.000	1.426.440.000	-	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik					100%	100%	4.331.374.400	4.474.705.600	143.331.200					
4.01.4.01.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Jenis	2 Jenis	38.500.000	34.010.000	(4.490.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional	-	Setdako	-	Banjarbaru	-	2 Unit	-	703.430.000	703.430.000	-	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	3 Jenis	0 Jenis	186.020.000	-	(186.020.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	2 Jenis	0 Jenis	217.162.000	-	(217.162.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rutin rumah jabatan	Terpeliharanya rutin rumah jabatan	Rumah jabatan KDH/WKDH	Rumah jabatan KDH/WKDH	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	179.600.000	179.600.000	-	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan dalam kondisi baik	Terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan dalam kondisi baik	Mobil Jabatan KDH/WKDH	Mobil Jabatan KDH/WKDH	Banjarbaru	Banjarbaru	2 Unit	2 Unit	274.622.400	296.622.400	22.000.000	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Kendaraan Dinas/Operasional Setdako	Kendaraan Dinas/Operasional Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	122 Unit	122 Unit	1.500.000.000	1.496.116.000	(3.884.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Rumah Jabatan/ Dinas	Rumah Jabatan/ Dinas	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	92.000.000	65.000.000	(27.000.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	20 Jenis	20 Jenis	374.800.000	330.000.000	(44.800.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya rutin peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	Terpeliharanya rutin peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	Rumah Jabatan/ Dinas	Rumah Jabatan/ Dinas	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	172.000.000	168.000.000	(4.000.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	9 jenis	9 Jenis	400.550.000	389.550.000	(11.000.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	4 jenis	4 Jenis	27.440.000	-	(27.440.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	1 bangunan	1 bangunan	111.480.000	193.177.200	81.697.200	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.49	Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat	Tersedianya rumah dinas pejabat Setdako, KDH dan WKDH	Tersedianya rumah dinas pejabat Setdako, KDH dan WKDH	Rumah Dinas Pejabat	Rumah Dinas Pejabat	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	102.000.000	126.000.000	24.000.000	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.02.57	Pengamanan Gedung Kantor	Tersedianya jumlah tenaga keamanan	Tersedianya jumlah tenaga keamanan	Petugas Pengamanan Dalam	Petugas Pengamanan Dalam	Banjarbaru	Banjarbaru	33 orang	33 orang	655.200.000	493.200.000	(162.000.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai					100%	90%	319.400.000	319.400.000	-					

4.01.4.01.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya aparatur yang kompeten dan berjiwa melayani	KDH/WKDH, dan Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	67 set	67 set	84.400.000	84.400.000	-	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.01.03.08	Pengadaan Pakaian Adat	Tersedianya Pakaian Adat	Tersedianya Pakaian Adat	Meningkatnya aparatur yang kompeten dan berjiwa melayani	KDH/WKDH, dan Pimpinan SKPD	Banjarbaru	Banjarbaru	202 set	202 set	235.000.000	235.000.000	-	APBD	APBD				
			Tersedianya pakaian batik tradisional/saingan															
4.01.4.01.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP Setda					BB	BB	170.756.750	153.330.500	(17.426.250)						
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti						100%									
			Persentase Terbik Administrasi Barang/Aset Daerah						100%									
4.01.4.01.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	7 dokumen	7 dokumen	102.576.000	101.706.000	(870.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.01.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Banjarbaru	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	1 dokumen	1 dokumen	51.624.500	51.624.500	-	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.01.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Jumlah laporan inventarisasi barang tepat waktu	Jumlah laporan inventarisasi barang tepat waktu	Setdako	Setdako	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	16.556.250	-	(16.556.250)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.02	SETDAKO - BAGIAN HUKUM								100%	1.560.403.500	883.307.250	(677.096.250)						
4.01.4.01.03.02.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah					100%	100%	1.560.403.500	883.307.250	(677.096.250)						
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dan Sinkron dengan Peraturan perUndang-Undangan dan Kebutuhan Masyarakat	Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dan Sinkron dengan Peraturan perUndang-Undangan dan Kebutuhan Masyarakat					100%	100%									
4.01.4.01.03.02.26.01	Koordinasi Kerjasama Pemecahan Peraturan Perundang-Undangan	- Evaluasi Perda	- Evaluasi Perda	SKPD Teknis Terkait	SKPD Teknis Terkait	Banjarbaru	Banjarbaru	9 perda	9 perda	199.220.500	97.115.500	(102.105.000)	APBD	APBD				
		- Fasilitas Perwali	- Fasilitas Perwali					15 perwali	15 perwali									
4.01.4.01.03.02.26.02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah RAPERDA Kota Banjarbaru	Jumlah RAPERDA Kota Banjarbaru	SKPD Teknis Terkait	SKPD Teknis Terkait	Banjarbaru	Banjarbaru	9 Raperda	12 Raperda	217.270.500	138.345.000	(78.925.500)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.02.26.03	Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah naskah akademik Raperda	Jumlah naskah akademik Raperda	SKPD Teknis Terkait	SKPD Teknis Terkait	Banjarbaru	Banjarbaru	4 Naskah	2 Naskah	206.400.000	105.400.000	(101.000.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.02.26.05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terpublikasinya/Tersebarluaskannya produk hukum melalui :	Terpublikasinya/Tersebarluaskannya produk hukum melalui :	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru			122.378.500	65.773.250	(56.605.250)	APBD	APBD				
		a. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum	a. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum					5 Kali	3 Kali									
		b. Media Cetak	b. Media Cetak					5 Jenis	5 Jenis									
4.01.4.01.03.02.26.07	Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum yang Ditangani	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum yang Ditangani	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	8 Perkara	8 Perkara	541.160.500	267.680.500	(273.480.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.02.26.14	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	Jumlah sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	Jumlah sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	Aparatur	Aparatur	Banjarbaru	Banjarbaru	3 kali	0 kali	66.083.500	27.573.500	(38.510.000)	APBD	APBD				
			Penilaian Kota Peduli HAM						1 kali									
4.01.4.01.03.02.26.16	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui :	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui :	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru			52.522.500	38.970.500	(13.552.000)	APBD	APBD				
		a. Sistem Online	a. Sistem Online					1 Buah Website	1 Buah Website									
		b. Sistem Offline	b. Sistem Offline					1 Buah Arjungan Informasi Mandiri (APHAM)	1 Buah Arjungan Informasi Mandiri (APHAM)									
4.01.4.01.03.02.26.17	Pembinaan Kadarum dan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Banjarbaru	Terbinanya Kadarum dan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Banjarbaru	Terbinanya kadarum dan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Banjarbaru	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	5 kali	5 kali	155.367.500	142.449.000	(12.918.500)						
4.01.4.01.03.03	SETDAKO - BAGIAN PEMERINTAHAN							100%	100%	1.291.743.700	1.043.214.700	(248.529.000)						
4.01.4.01.03.03.29	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	434.733.950	202.954.950	(231.779.000)						
		Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan						32 SKPD										
4.01.4.01.03.03.29.02	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan SPM		Aparatur	Aparatur	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen		205.857.450	115.078.450	(90.779.000)	APBD	APBD				
		Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen									
		Dokumen Rekapitulasi Laporan Rakor Unit Kerja	Dokumen Rekapitulasi Laporan Rakor Unit Kerja					1 Dokumen	1 Dokumen									
4.01.4.01.03.03.29.04	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Kali	3 Kali	228.876.500	87.876.500	(141.000.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.03.38	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah					100%	100%	654.958.500	410.208.500	(244.750.000)						
4.01.4.01.03.03.38.02	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	2 Kali	2 Kali	495.342.500	259.417.500	(235.925.000)	APBD	APBD				

4.01.4.01.03.03.38.04	Realisasi Desk Pilkada tahun 2020	Terlaksananya Desk Pilkada tahun 2020	Terlaksananya Desk Pilkada tahun 2020	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	2 kali	2 kali	159.616.000	150.791.000	(8.825.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.03.39	Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan	Persentase Kinerja Kecamatan dan atau Kelurahan yang mencapai target sesuai dengan indikator yang ditetapkan	Persentase Kinerja Kecamatan dan atau Kelurahan yang mencapai target sesuai dengan indikator yang ditetapkan					100%	100%	202.051.250	430.051.250	228.000.000						
4.01.4.01.03.03.39.01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Jumlah Peserta Rakor Bulanan Camat dan Lurah untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan se Kota Banjarbaru Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan	Jumlah Peserta Rakor Bulanan Camat dan Lurah untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan se Kota Banjarbaru Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Kecamatan 20 Kelurahan	5 Kecamatan 20 Kelurahan	103.595.250	363.295.250	259.700.000	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.03.39.02	Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya : Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya : Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan	Aparatur	Aparatur	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Kecamatan 20 Kelurahan	5 Kecamatan 20 Kelurahan	98.456.000	66.756.000	(31.700.000)	APBD	APBD				
		Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan dan Kelurahan					1 kali	1 kali									
4.01.4.01.03.04	SETDAKO - BAGIAN ORGANISASI							100%	100%	1.182.523.150	596.828.900	(585.694.250)						
4.01.4.01.03.04.33	Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran					100%	100%	302.546.500	123.425.000	(179.121.500)						
4.01.4.01.03.04.33.01	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawalan	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawalan	Penko Banjarbaru	Penko Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Kegiatan	0 Kegiatan	42.895.000	-	(42.895.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.04.33.02	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen Analisis Beban Kerja	Dokumen Analisis Beban Kerja	Penko Banjarbaru	Penko Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	25 Dokumen	25 Dokumen	139.820.000	123.425.000	(16.395.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.04.33.04	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana	Penko Banjarbaru	Penko Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	0 Dokumen	119.831.500	-	(119.831.500)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.04.50	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat					Sangat Baik	Sangat Baik	879.976.650	473.403.900	(406.572.750)						
		Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan					Hijau (81,00)	Hijau (81,00)									
		Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru					BB	BB									
4.01.4.01.03.04.50.32	Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Penyusunan Laporan Kinerja Kota dan SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja Kota dan SKPD	SKPD	SKPD	Banjarbaru	Banjarbaru	32 SKPD	32 SKPD	112.215.000	41.478.000	(70.737.000)	APBD	APBD				
		Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota dan SKPD	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota dan SKPD					32 SKPD	32 SKPD									
		Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD					32 SKPD	32 SKPD									
		Kesekretariatan SAKIP Kota Banjarbaru	Kesekretariatan SAKIP Kota Banjarbaru					1 Kegiatan	1 Kegiatan									
		Asistensi Pra Evaluasi SAKIP Kota dan SKPD	Asistensi Pra Evaluasi SAKIP Kota dan SKPD					32 SKPD	32 SKPD									
4.01.4.01.03.04.50.27	Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru	Dokumen PMPRB Kota dan SKPD	Dokumen PMPRB Kota dan SKPD	Aparatur	Aparatur	Banjarbaru	Banjarbaru	32 SKPD	32 SKPD	155.391.400	78.491.400	(76.900.000)	APBD	APBD				
		Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi Kota Banjarbaru	Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi Kota Banjarbaru					1 Kegiatan	1 Kegiatan									
		Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur	Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur					1 Kegiatan	1 Kegiatan									
4.01.4.01.03.04.50.25	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	SKPD Lingkup Penko Banjarbaru	SKPD Lingkup Penko Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	1 Dokumen	202.543.750	64.783.500	(137.760.250)	APBD	APBD				
		Dokumen SKM Kota Banjarbaru	Dokumen SKM Kota Banjarbaru					1 Dokumen	1 Dokumen									
		Dokumen Proposal Sinovik	Dokumen Proposal Sinovik					1 Dokumen	1 Dokumen									
4.01.4.01.03.04.50.33	Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SPV SKPD)	Jumlah SKPD yang mempunyai Peta Proses Bisnis	Jumlah SKPD yang mempunyai Peta Proses Bisnis	SKPD Lingkup Penko Banjarbaru	SKPD Lingkup Penko Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	5 SKPD	5 SKPD	76.054.500	11.284.500	(64.770.000)	APBD	APBD				
		Jumlah SKPD yang mempunyai SOP	Jumlah SKPD yang mempunyai SOP					5 SKPD	5 SKPD									
4.01.4.01.03.04.50.14	Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan yang diperbaharui yang dicetak	Jumlah Kebijakan yang diperbaharui yang dicetak	Aparatur	Aparatur	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Peraturan/Keputusan Walikota	1 Peraturan/Keputusan Walikota	126.434.000	119.358.500	(7.075.500)	APBD	APBD				
		Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang dicetak	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang dicetak					1000 Buah	1000 Buah									
4.01.4.01.03.04.50.36	Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Dokumen Perwali Analisis Jabatan	Dokumen Perwali Analisis Jabatan	SKPD Lingkup Penko Banjarbaru	SKPD Lingkup Penko Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	25 Dokumen	25 Dokumen	207.338.000	158.008.000	(49.330.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.05	SETDAKO - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL							100%	100%	4.756.424.000	3.561.916.500	(1.194.507.500)						
4.01.4.01.03.05.08	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Acara Keprotokolan Sesuai Dengan Standar dan Aturan Yang Berlaku	Persentase Penyelenggaraan Acara Keprotokolan Sesuai Dengan Standar dan Aturan Yang Berlaku					100%	100%	4.756.424.000	3.561.916.500	(1.194.507.500)						
4.01.4.01.03.05.08.02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Pelaksanaan Keprotokolan dan Acara Pemerintah Daerah berupa Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	Jumlah Pelaksanaan Keprotokolan dan Acara Pemerintah Daerah berupa Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	Masyarakat	Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	35 Kali	35 Kali	296.880.000	47.738.000	(249.142.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.05.08.03	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Acara Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Acara Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Aparatur	Aparatur	Banjarbaru	Banjarbaru	500 Kegiatan	500 Kegiatan	337.698.000	262.571.500	(75.126.500)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.05.08.05	Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/ Sekda kedinasan yang diliput dan didokumentasikan	Terlaksananya Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/ Sekda kedinasan yang diliput dan didokumentasikan	Kegiatan Pimpinan	Kegiatan Pimpinan	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan/ 500 Kegiatan	12 bulan/ 500 Kegiatan	429.320.000	405.881.000	(23.439.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.05.08.06	Publikasi kegiatan pimpinan	Jumlah acara kedinasan yang di publikasikan	Jumlah acara kedinasan yang di publikasikan	Kegiatan Pimpinan	Kegiatan Pimpinan	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan/ 550 Kegiatan	12 bulan/ 775 Kegiatan	1.127.397.000	514.397.000	(613.000.000)	APBD	APBD				
4.01.4.01.03.05.08.07	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Pemerintah Daerah	Informasi acara kedinasan yang di sebarluaskan melalui media cetak dan elektronik	Informasi acara kedinasan yang di sebarluaskan melalui media cetak dan elektronik	KDN/WKDN Kota Banjarbaru	KDN/WKDN Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	12 bulan	12 bulan	2.565.129.000	2.331.329.000	(233.800.000)	APBD	APBD				

4.01.4.01.03.06	SETDAKO - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									100%	1.327.445.450	1.195.948.400	(131.497.050)					
4.01.4.01.03.06.29	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	Jumlah SKPD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan					32 SKPD	32 SKPD		1.021.701.300	1.106.521.300	84.820.000					
4.01.4.01.03.06.29.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - Jumlah Dokumen Data Informasi Bahan Kebijakan - Tim Sinergi Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan - Jumlah Pengendalian Paket Pekerjaan	- Jumlah Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - Jumlah Dokumen Data Informasi Bahan Kebijakan - Tim Sinergi Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan - Jumlah Pengendalian Paket Pekerjaan	SKPD yang terkait	SKPD yang terkait	Banjarbaru	Banjarbaru	4 kali	4 kali		1.021.701.300	1.106.521.300	84.820.000	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.06.32	Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang perekonomian Walikota Banjarbaru	Jumlah kebijakan bidang perekonomian					1 Kebijakan/Rekom	1 Kebijakan/Rekom		224.837.350	86.147.600	(138.689.750)					
4.01.4.01.03.06.32.07	Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	Jumlah Rapat Peningkatan koordinasi pengembangan UKM	Jumlah Rapat Peningkatan koordinasi pengembangan UKM	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	8 kali	3 kali		33.329.150	6.495.400	(26.833.750)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.06.32.12	Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	Jumlah Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	Jumlah Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	SKPD terkait	SKPD terkait	Banjarbaru	Banjarbaru	2 kali	2 kali		12.774.500	12.774.500	-	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.06.32.16	Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	Jumlah Rapat Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Rapat Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	SKPD	SKPD	Banjarbaru	Banjarbaru	2 kali	2 kali		58.724.500	7.764.500	(50.960.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.06.32.17	Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	- Jumlah rapat koordinasi TPID Kota Banjarbaru - Dokumen pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	- Jumlah rapat koordinasi TPID Kota Banjarbaru - Dokumen pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	8 kali	8 kali		84.188.200	49.913.200	(34.275.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.06.32.18	Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rapat Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rapat Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	6 kali	2 kali		35.821.000	9.200.000	(26.621.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.06.34	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota Banjarbaru	Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota Banjarbaru					2 Perusahaan/Lembaga Pendonor	2 Perusahaan/Lembaga Pendonor		80.906.800	3.279.500	(77.627.300)					
4.01.4.01.03.06.34.03	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	Jumlah Kemitraan Pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota	Jumlah Kemitraan Pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota	Perusahaan terkait	Perusahaan terkait	Banjarbaru	Banjarbaru	4 Perusahaan	0 Perusahaan		80.906.800	3.279.500	(77.627.300)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.07	SETDAKO - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									100%	3.801.018.450	2.008.618.550	(1.792.399.900)					
4.01.4.01.03.07.35	Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan					100%	100%		2.556.423.050	1.507.318.650	(1.049.104.400)					
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam Jumlah Safari/Silaturahmi dan Tamir Ramadhan Jumlah Safari Jumat Bersama Walikota & Wakil Walikota Banjarbaru Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Banjarbaru dan Tingkat Provinsi Jumlah Pelaksanaan Ibadah Haji Jumlah Pelaksanaan Pembagian Honorarium Payugas Kebersihan Rumah Ibadah Muslim dan Non Muslim Jumlah Pelaksanaan Training Center Jumlah Tenaga Petugas Haji Daerah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BKPRMI	Jumlah Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam Jumlah Safari/Silaturahmi dan Tamir Ramadhan Jumlah Safari Jumat Bersama Walikota & Wakil Walikota Banjarbaru Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Banjarbaru dan Tingkat Provinsi Jumlah Pelaksanaan Ibadah Haji Jumlah Pelaksanaan Pembagian Honorarium Payugas Kebersihan Rumah Ibadah Muslim dan Non Muslim Jumlah Pelaksanaan Training Center Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BKPRMI	Masyarakat	Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	2 kali	2 kali		2.556.423.050	1.507.318.650	(1.049.104.400)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam	Jumlah Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam					13 kali	0 kali									
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Safari Jumat Bersama Walikota & Wakil Walikota Banjarbaru	Jumlah Safari Jumat Bersama Walikota & Wakil Walikota Banjarbaru					30 kali	0 kali									
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Banjarbaru dan Tingkat Provinsi	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Banjarbaru dan Tingkat Provinsi					2 kegiatan	1 kegiatan									
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Ibadah Haji	Jumlah Pelaksanaan Ibadah Haji					2 kegiatan	1 kegiatan									
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Pembagian Honorarium Payugas Kebersihan Rumah Ibadah Muslim dan Non Muslim	Jumlah Pelaksanaan Pembagian Honorarium Payugas Kebersihan Rumah Ibadah Muslim dan Non Muslim					2 kali	2 kali									
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Training Center	Jumlah Pelaksanaan Training Center					1 kegiatan	1 kegiatan									
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Tenaga Petugas Haji Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD)					1 orang	1 orang									
4.01.4.01.03.07.35.01	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BKPRMI	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BKPRMI					0 kegiatan	1 kegiatan									
4.01.4.01.03.07.37	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Fasilitas Pelayanan Santunan dan Bantuan Rukun Kematian	Persentase Fasilitas Pelayanan Bantuan Rukun Kematian					100%	100%		90.585.000	44.855.000	(45.730.000)					
4.01.4.01.03.07.37.02	Pelaksanaan Rukun Kematian	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan Jenazah Jumlah Sosialisasi Perwali Rukun Kematian	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan Jenazah Jumlah Sosialisasi Perwali Rukun Kematian	Masyarakat	Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	5 kali	1 kali		90.585.000	44.855.000	(45.730.000)	APBD	APBD			
4.01.4.01.03.07.37.02	Pelaksanaan Rukun Kematian	Jumlah Sosialisasi Perwali Rukun Kematian	Jumlah Sosialisasi Perwali Rukun Kematian					3 kali	1 kali									
4.01.4.01.03.07.31	Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat					100%	100%		1.154.010.400	456.444.900	(697.565.500)					

4.01.4.01.03.07.31.01	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi dengan kelompok masyarakat (anak yatim/piatu)	Koordinasi dengan kelompok masyarakat (anak yatim/piatu)	Masyarakat	Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	1 kali	0 kali	337.768.500	721.500	(337.047.000)	APBD	APBD		
		Koordinasi dan sosialisasi bidang kesehatan, pertanian & KB dengan SKPD dan Stakeholder	Koordinasi dan sosialisasi bidang kesehatan, pertanian & KB dengan SKPD dan Stakeholder					3 kali	0 kali							
4.01.4.01.03.07.31.02	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	Silaturahmi dan Pengembangan Sosial Budaya dengan Seriniman, Budayawan dan Pelaku Seni	Silaturahmi dan Pengembangan Sosial Budaya dengan Seriniman, Budayawan dan Pelaku Seni	Seriniman, Budayawan, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Disabilitas Netra	Seriniman, Budayawan, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Disabilitas Netra	Banjarbaru	Banjarbaru	1 kali	0 kali	631.806.000	405.810.000	(225.996.000)	APBD	APBD		
		Silaturahmi dan koordinasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat	Silaturahmi dan koordinasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat					5 kali	1 kali							
		Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra	Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra					74 kali	86 kali							
4.01.4.01.03.07.31.03	Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Silaturahmi Pemberdayaan Masyarakat	Silaturahmi Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	3 kali	2 kali	38.916.000	23.770.000	(15.146.000)	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.07.31.05	Facilitasi Bantuan Sosial	Jumlah Sosialisasi Peraturan tentang Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah Sosialisasi Peraturan tentang Bantuan Sosial dan Hibah	Camat, Lurah, Kasi Kessos Kelurahan, Mahasiswa, Pemuda, Tokoh Masyarakat	Camat, Lurah, Kasi Kessos Kelurahan, Mahasiswa, Pemuda, Tokoh Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	10 kali	1 kali	96.508.400	26.143.400	(70.365.000)	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.07.31.06	Pembinaan dan Pengembangan UKS	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	Sekolah, Guru dan Murid TK/SD/SMP/SMA/ Sederajat	Sekolah, Guru dan Murid TK/SD/SMP/SMA/ Sederajat	Banjarbaru	Banjarbaru	4 kali	0 kali	49.011.500	-	(49.011.500)	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.08	SETDAKO - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								100%	230.420.400	156.685.650	(73.734.750)				
4.01.4.01.03.08.49	Program Facilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Bagian PB3	Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Bagian PB3					100%	100%	230.420.400	156.685.650	(73.734.750)				
4.01.4.01.03.08.49.02	Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah evaluasi dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah	Jumlah evaluasi dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Banjarbaru	Banjarbaru	4 kali/ 4 Laporan Tahunan	4 kali/ 4 Laporan Tahunan	48.575.000	48.575.000	-	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.08.49.03	Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah SKPD yang Terlayani dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	Jumlah SKPD yang Terlayani dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Banjarbaru	Banjarbaru	34 SKPD	34 SKPD	90.685.400	66.211.400	(24.474.000)	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.08.49.04	Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang terlayani dalam bidang Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah SKPD yang terlayani dalam bidang Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Banjarbaru	Banjarbaru	34 SKPD	34 SKPD	91.160.000	41.899.250	(49.260.750)	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.09	SETDAKO - BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN								100%	958.966.900	322.238.810	(636.728.090)				
4.01.4.01.03.09.09	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan					25%	25%	148.391.800	116.216.800	(32.175.000)				
4.01.4.01.03.09.09.01	Facilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Naskah Kerjasama Aktif Antar Daerah yang di Implementasikan	Jumlah Naskah Kerjasama Aktif Antar Daerah yang di Implementasikan	Aparatur	Aparatur	Banjarbaru	Banjarbaru	100 Naskah	24 Naskah	148.391.800	116.216.800	(32.175.000)	APBD	APBD		
		Jumlah Pertemuan APEKSI regional dan nasional	Jumlah Pertemuan APEKSI regional dan nasional					4 kali	5 kali							
4.01.4.01.03.09.16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Penyelesaian Tata Batas Wilayah Antar Kelurahan dan atau Kecamatan	Jumlah Penyelesaian Tata Batas Wilayah antar Kelurahan dan Atau Kecamatan					3 Wilayah	3 Wilayah	810.575.100	206.022.010	(604.553.090)				
4.01.4.01.03.09.16.02	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	1 Dokumen	63.639.000	2.430.000	(61.209.000)	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.09.16.10	Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	Jumlah tata batas wilayah administrasi kelurahan	Jumlah tata batas wilayah administrasi kelurahan	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	4 kelurahan	4 kelurahan	207.250.500	1.295.250	(205.955.250)	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.09.16.11	Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah	Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah pemko	Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah pemko	Aparatur dan Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	Banjarbaru	Banjarbaru	16 kali	6 kali	539.685.600	202.296.760	(337.388.840)	APBD	APBD		
		Sosialisasi masalah pertanahan	Sosialisasi masalah pertanahan					1 kali	1 kali							
		Dokumen Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Menghentikan Tanah	Dokumen Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Menghentikan Tanah					150 Sertifikat	5 Sertifikat							
		Pembuatan patok pengamanan tanah	Pembuatan patok pengamanan tanah					10 Buah	10 Buah							
		Pembuatan papan nama pengamanan tanah	Pembuatan papan nama pengamanan tanah					10 Buah	10 Buah							

Banjarbaru, 2020

Sekretaris Daerah,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008